

**PERAN MANAJEMEN TEMPAT PELELANGAN IKAN TERHADAP  
PEMASARAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN  
IKAN (TPI) BULU MEDURO, KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Oleh:

**RENI TRI HANDAYANI  
NIM. 135080401111085**



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**

**PERAN MANAJEMEN TEMPAT PELELANGAN IKAN TERHADAP  
PEMASARAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN  
IKAN (TPI) BULU MEDURO, KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR**

**SKRIPSI  
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan di  
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya**

Oleh:

**RENI TRI HANDAYANI  
NIM. 135080401111085**



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**

SKRIPSI

PERAN MANAJEMEN TEMPAT PELELANGAN IKAN TERHADAP  
PEMASARAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN  
IKAN (TPI) BULU MEDURO, KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR

Oleh:

RENI TRI HANDAYANI

135080401111085

telah dipertahankan di depan penguji  
pada tanggal 4 Juli 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



(Dr. Ir. Edi Susilo, MS.)

NIP. 19591205 198503 1 003

Tanggal: 19 JUL 2019

(Tiwi Nurjannati Utami, S.Pi, MM)

NIP. 19750322 200604 2 002

Tanggal: 19 JUL 2019



Scanned with  
CamScanner



Judul : **PERAN MANAJEMEN TEMPAT PELELANGAN IKAN TERHADAP PEMASARAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) BULU MEDURO, KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR.**

Nama Mahasiswa : Reni Tri Handayani

NIM : 135080401111085

Program Studi : Agrobisnis Perikanan

**PENGUJI PEMBIMBING**

Pembimbing : Tiwi Nurjannati Utami, S.Pi, MM

**PENGUJI BUKAN PEMBIMBING**

Dosen Penguji 1 : Dr. Ir. Pudji Purwanti MP

Dosen Penguji 2 : Wildan Al Farizi, SE, M.Ling

Tanggal Ujian : 4 Juli 2019



## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran penulis dalam menulis laporan penelitian ini. Penelitian dengan judul **“PERAN MANAJEMEN TEMPAT PELELANGAN IKAN TERHADAP PEMASARAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) BULU MEDURO, KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR”** dapat diselesaikan. Penulis menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT atas karunia dan kesehatan yang diberikan selama ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua saya, Ibu Surtini dan Bapak Sukro Ikhwanto yang tidak pernah lelah memberi dukungan dan do'a serta kepercayaan sehingga saya mampu menyelesaikan studi. Serta kakak dan adik yang selalu memberi semangat.
3. Ibu Tiwi Nurjannati Utami, S.Pi, MM selaku dosen pembimbing dan guru dalam berbagai pengalaman dengan segala petunjuk dan kesabaran dalam membimbing sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Mas Gatot, Mas Nasir, Pak Harsono, dan semua keluarga di Tuban yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta kesempatan bagi saya sehingga dapat melakukan penelitian.
5. Mas Sinta Widodo yang selalu sabar dan menjadi dukungan terbaik setelah Ibu dan Bapak. Selalu memberi dorongan dan semangat sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini
6. Mas Azhar Tri Bintang yang sudah banyak membantu memberikan saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

7. Yogita, Yaya, Lisa dan Keluarga Besar HMI Komisariat Perikanan dan Ilmu Kelautan yang tidak dapat saya sebutkan satu pesatu.
8. Teman-teman angkatan 2013 dan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Riris Dwiyanti, Belinda, Fera, lis, Lela dan semua teman- teman kos Putri Amanah.

Malang, 12 Juli 2019

Penulis



## RINGKASAN

**RENI TRI HANDAYANI.** Judul Skripsi Peran Manajemen Tempat Pelelangan Ikan Terhadap Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI Bulu Meduro, Kabupaten tuban, Jawa Timur dibawah dosen pembimbing **Tiwi Nurjannati Utami S.Pi, MM**

---

Pembangunan perikanan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional khususnya perikanan tangkap bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut yang ditempuh adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perikanan salah satunya dengan adanya bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) . TPI berfungsi sebagai penyelenggara pemasaran atau pelelangan hasil tangkapan nelayan yang mampu mengangkat daya tawar nelayan terhadap pedagang dengan menciptakan harga dan sistem pembayaran yang layak. Akan tetapi pelelangan di Indonesia belum sepenuhnya maksimal yang disebabkan banyak faktor, salah satunya di TPI Bulu Meduro yang sempat tidak berjalan karena adanya konflik yang timbul karena manajemen yang kurang terorganisir dengan baik dan sistem pembayaran yang dianggap merugikan nelayan. Hal tersebut mengakibatkan nelayan kehilangan kepercayaan pada TPI dan tidak mau mengikuti pelelangan sehingga pelelangan di TPI Bulu sempat tidak beroperasi.

Tujuan dari penelitian ini pertama, Mempelajari dan mendeskripsikan manajemen Tempat Pelelangan Ikan Bulu Meduro. Kedua, mendeskripsikan perbedaan sistem pelelangan tertutup dan sistem pelelangan terbuka di TPI Bulu Meduro. Ketiga, menganalisis peran manajemen pelelangan ikan terhadap hasil tangkapan nelayan di TPI Bulu Meduro, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dan snowball sampling, dimana sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model interaktif dari Milles dan Huberman.

Hasil penelitian yang pertama , Manajemen Tempat Pelelangan Ikan Bulu meduro Tuban dan Pelabuhan berada dibawah naungan yang berbeda TPI bertanggung jawab langsung pada Dinas Perikanan dan Peternakan sedangkan Pelabuhan bertanggung jawab pada Propinsi. Perencanaan dibuat oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban yang kemudian diimplementasikan oleh TPI, dalam pelaksanaan teknis TPI telah memiliki *Standart Operasional Prosedur* (SOP) yang jelas dan memiliki peraturan yang mengacu pada Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2014. Akan tetapi masih terdapat prosedur yang belum sesuai peraturan yang berlaku, seperti bakul yang seharusnya menaruh uang di TPI sebelum mengikuti pelelangan akan tetapi belum dapat dilakukan. Struktur organisasi berbentuk lini, dimana hubungan pemimpin bersifat langsung, dan pengarahan dilakukan dari Kepala Dinas pada Kepala UPTD kemudian ke Administratur dan karyawan. Penggerakan telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok yang ditetapkan Peraturan Bupati, dan pelaksanaan teknis pelelangan dijalankan sesuai dengan SOP yang ada tetapi masih ada persoalan ketertiban peserta yang belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Pengawasan dilakukan secara langsung setiap harinya oleh administratur dan Kepala UPTD.

Hasil penelitian yang kedua, TPI Bulu Meduro memiliki dua sistem pelelangan yaitu pelelangan tertutup (tradisional) dan pelelangan terbuka (murni) yang memiliki perbedaan pada mekanismenya. Pelelangan tradisional dilakukan di dermaga bongkar muat setelah ikan turun kapal, transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan dua belah pihak yaitu nelayan dan bakul yang bersangkutan, harga ditentukan atas kesepakatan bersama dan pembayaran dilakukan secara langsung dan kemudian membayar retribusi kepada TPI. Sedangkan pelelangan murni dilakukan di Hall TPI dengan dipandu juru lelang setelah nelayan melakukan bongkar muat di dermaga dan dilelang sesuai antrian masuk, pelelangan dilakukan di depan semua bakul peserta lelang dan harga ditentukan mulai dari harga terendah di pasaran yang terus naik sampai ditetapkan pemenang lelang, kemudian bakul dan nelayan akan melakukan pembayaran maupun mengambil hasil penjualan di kasir sesuai karcis yang diberikan dengan dipotong retribusi yang telah ditentukan.

Manajemen TPI memiliki peran yang sangat penting terhadap pemasaran hasil tangkapan nelayan. Sesbelum ada perbaikan manajemen TPI sempat berhenti beroperasi karena adanya konflik yang diakibatkan manajemen yang kurang terorganisir sehingga administrasi tidak berjalan dengan teratur dan transparan, bakul melakukan penunggakan pembayaran dan pencatatan tidak tersusun dengan baik sehingga pembayaran hasil pelelangan nelayan tidak terbayar tepat waktu. Hal ini menimbulkan konflik dan membuat nelayan tidak mau mengikuti pelelangan kembali sehingga TPI tidak dapat beroperasi. Dinas perikanan melakukan perbaikan pada manajemen TPI sehingga TPI dapat beroperasi kembali secara bertahap.

Kesimpulan dari penelitian ini, pertama manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu Meduro sudah berjalan cukup baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, serta pengawasan dilakukan dengan terstruktur. Meskipun masih ada pelanggaran peraturan yang belum dapat ditertibkan mengenai peserta pelelangan dalam pembayaran maupun penjualan. Kedua, Perbedaan siste pelelangan tradisional dan pelelangan murni terletak pada mekanisme pelelangan dan pembayaran yang dilakukan peserta lelang maupun pihak TPI. Ketiga, Manajemen TPI memiliki peran yang sangat penting terhadap pemasaran hasil tangkapan nelayan. Nelayan lebih memiliki kepercayaan mengikuti pelelangan apabila manajemen dijalankan dengan baik dan transparan.

Saran yang dapat diberikan adalah TPI harus lebih berani tegas terhadap bakul agar mau menaruh uang secara inden sebelum mengikuti pelelangan, dengan demikian penunggakan pembayaran hasil borongan dapat diantisipasi. Perlu adanya koperasai bagi nelayan sehingga nelayan memiliki rujukan untuk melakukan peminjaman uang untuk melaut sehingga tidak perlu menghutang pada bakul sehingga terlibat jerat sosial. Nelayan dan bakul bisa lebih terbuka menyampaikan keluhan sehingga TPI dapat melakukan perbaikan secara tepat guna.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan usulan skripsi dengan judul: **“Peran Manajemen Tempat Pelelangan Ikan terhadap Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu Meduro, Kabupaten Tuban, Jawa Timur”**. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Tiwi Nurjannati Utammi, S.Pi, MM selaku dosen pembimbing dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan usulan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi latar belakang, metode penelitian, sistematika penulisan dan juga penggunaan bahasa. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar kedepannya dapat menyusun suatu karya tulis ilmiah dengan pola dan aturan yang baik dan benar. Penulis mengharapkan usulan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri. Demikian penulis sampaikan terimakasih.

Malang, 12 Juli 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
RINGKASAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan .....	5
1.4 Kegunaan.....	6
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Manajemen.....	14
2.2.1 Definisi Manajemen.....	14
2.2.2 Tujuan Manajemen.....	15
2.2.3 Fungsi-fungsi Manajemen .....	16
2.3 Manajemen TPI .....	19
2.4 Masyarakat Nelayan.....	21
2.4.1 Hubungan Nelayan dengan Tengkulak.....	21
2.4.2 Hubungan Nelayan dengan TPI.....	22
2.4.3 Pendapatan Nelayan .....	24
2.5 Tempat Pelelangan Ikan.....	25
2.6 Pelelangan Ikan.....	27
2.7 Retribusi .....	28
2.8 Kerangka Berfikir.....	30
<b>3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.2. Pendekatan Penelitian.....	32
3.3. Teknik Pengambilan Sampel .....	32
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4.1 Observasi .....	35
3.4.2 Wawancara .....	35
3.4.3 Dokumentasi .....	36
3.4.4 Triangulasi.....	36
3.4 Metode Analisis Data.....	37

4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	40
4.1 Letak Geografis dan Topografi .....	40
4.2 Sejarah Desa Bulumeduro.....	40
4.3 Keadaan Penduduk Desa Bulu Meduro .....	42
4.3.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	43
4.3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	43
4.3.3 Keadaan Umum Perikanan.....	44
5. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
5.1 Tempat Pelelangan Ikan Bulumeduro.....	46
5.2 Manajemen Tempat Pelelangan Ikan .....	48
5.2.1 Mekanisme Pelelangan .....	50
5.2.2 Administrasi TPI .....	53
5.3 Sarana dan Prasarana.....	56
5.4 Analisis Fungsi Manajemen TPI Bulu Meduro.....	58
5.4.1 <i>Planning</i> (Perencanaan) .....	58
5.4.2 <i>Organizing</i> (Pengorganisasian) .....	63
5.4.3 <i>Actuating</i> (Penggerakan) .....	65
5.4.4 <i>Controlling</i> (Pengawasan) .....	67
5.5 Hubungan sosial Nelayan, Bakul dan TPI Bulu Meduro.....	68
5.6 Analisis Peran Manajemen TPI.....	71
5.7 Peran Manajemen TPI Terhadap Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan .....	75
6. KESIMPULAN DAN SARAN .....	79
6.1 Kesimpulan.....	79
6.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN .....	86

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Matrik Penelitian Terdahulu .....	10
2. Tabel Informan Penelitian .....	33
3. Data Penduduk Desa Bulumeduro Berdasarkan Penggolongan Usia .....	42
4. Mata Pencarian Penduduk Desa Bulumeduro .....	43
5. Tingkatan Pendidikan Penduduk Desa Bulumeduro .....	44
6. Tugas Pokok Masing-masing Bidang Pada TPI Bulu Meduro .....	50
7. Sarana TPI Bulu Meduro .....	56
8. Prasarana TPI Bulu Meduro .....	57
9. Pencapaian TPI Bulu Meduro Setelah Diadakan Perbaikan .....	74
10. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Tuban .....	76

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Berfikir .....	30
2. Komponen dalam Analisis Data .....	39
3. Struktur Organisasi TPI Bulu Meduro Meduro.....	49
4. Standart Operasional Prosedure(SOP) Pelelangan Ikan di TPI Bulu Meduro.....	52
5. Standart Operasional Prosedure (SOP) Pembayaran Lelang .....	55



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan perikanan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional khususnya perikanan tangkap bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan nelayan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perikanan. Upaya ini dapat tercapai apabila pemanfaatan sumberdaya perikanan terlaksana secara rasional dan terjamin pemasarannya sehingga perlu ditunjang dengan pengadaan maupun pembangunan prasarana perikanan berupa pelabuhan perikanan. Oleh sebab itu selalu ada bangunan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di pelabuhan perikanan untuk memasarkan hasil tangkapan nelayan sebagai salah satu fungsi pelabuhan perikanan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 tahun 2006 tentang pelabuhan perikanan (Lubis *et al.*, 2010).

Menurut sejarahnya pelelangan ikan telah dikenal sejak tahun 1922, yang diselenggarakan oleh Koperasi Perikanan di Pulau Jawa. Tujuannya adalah untuk melindungi nelayan dari permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak/pengijon, membantu nelayan mendapatkan harga yang layak dan juga membantu nelayan dalam mengembangkan usahanya. Pada dasarnya sistem dari pelelangan ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar) dimana melewati penawaran umum dihadapan pembeli, yang berhak mendapatkan ikan hasil lelang adalah penawar tertinggi (Pramithasari *et al.*, 2006 dalam Hendrik, 2013).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memiliki fungsi yang sangat penting bagi nelayan, sebagaimana yang dikatakan oleh Susilowati (2004), bahwa salah satu fungsi utama TPI adalah menyelenggarakan pemasaran atau pelelangan hasil tangkapan nelayan. Pada proses pelelangan tersebut TPI mampu mengangkat

daya tawar (*bergaining position*) nelayan ketika berhadapan dengan pedagang, dengan terciptanya harga dan sistem pembayaran yang layak tanpa merugikan pedagang. Akan tetapi berdasarkan penelitian Lubis (2010), kenyataannya banyak pelabuhan perikanan tidak lagi melaksanakan aktivitas lelang yang sebenarnya. Harga ikan di TPI banyak dipengaruhi oleh pedagang pengepul sebagai pembeli maupun oleh juragan pemilik kapal. Jumlah pedagang tidak banyak, tapi saling bekerjasama dalam menentukan harga di TPI sehingga seakan-akan terbentuk pasar monopsoni yang berarti harga ikan ditentukan oleh pembeli. Pemerintah perlu membina sistem pelelangan untuk mencapai salah satu tujuan TPI dalam meningkatkan pendapatan nelayan. Tidak terlaksananya lelang ikan selain dapat merugikan nelayan juga tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas lelang tersebut.

Kelembagaan TPI merupakan kelembagaan ekonomi yang bergerak pada sektor pemasaran hasil tangkapan nelayan. TPI berperan penting dalam membantu memasarkan hasil perikanan, terutama apabila hasil penangkapan relatif banyak. Penjualan menjadi teratur dan cepat dibandingkan bila nelayan menjual secara individu, serta TPI dapat memberikan perlindungan bagi nelayan dalam hal permainan harga yang bisa dilakukan para pedagang. Sistem pelelangan dapat memungkinkan seluruh hasil tangkapan nelayan terjual habis, tanpa menunggu. Keuntungan lain yang diperoleh nelayan dengan keberadaan TPI adalah pengarahan yang diberikan pengelola TPI melalui kewajiban pembayaran uang simpanan serta menciptakan jual beli yang berkualitas yang menguntungkan nelayan tanpa merugikan pedagang. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelelangan ikan (Dwiyanti, 2010).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktifitas pelelangan di Indonesia masih dilakukan dengan sederhana karena kurang baiknya manajemen pengelola TPI maupun karena pergantian pihak pengelola. Seperti hasil

penelitian Lubis *et al.* (2010), yang menyatakan pada TPI PPN Pelabuhanratu dimana pelelangan ikan di TPI tidak berjalan setelah adanya pergantian pengelola dan lemahnya manajemen dan permodalan. Selain itu masih terdapat nelayan di pelabuhan perikanan yang menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak tanpa melalui pelelangan ikan yang dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelelangan melalui TPI dan adanya sistem langgan yang sulit diubah. Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada pihak nelayan maupun pemerintah daerah. Keuntungan pemasaran tanpa lelang hanya dapat dirasakan oleh pedagang pengepul karena harga ikan akan ditentukan oleh konsumen. Tidak maksimalnya atau tidak berjalannya aktivitas pelelangan pada TPI akan menimbulkan ketidak teraturan dan kerugian bagi nelayan selaku produsen dan pedagang sebagai konsumen. Oleh sebab itu perlu adanya manajemen yang baik pada TPI tamanya dalam pelelangan untuk pemasaran ikan.

Pelelangan di TPI Bulu Meduro telah mulai di uji coba pada bulan Desember 2014 dan mulai diaktifkan pada bulan Januari 2015 dengan menggunakan sistem lelang tradisional atau sistem lelang tertutup. Akan tetapi pelelangan hanya berjalan selama 3 bulan karena berbagai penyebab. Pada bulan Februari 2016 pihak Dinas perikanan melakukan pembinaan kepada petugas TPI Bulu Meduro dan melakukan sosialisasi kepada nelayan tentang sistem pelelangan murni atau sistem pelelangan terbuka, dan melakukan penurunan retribusi untuk menarik minat nelayan agar mengikuti lelang kembali. Hingga pada bulan Agustus 2017 aktivitas pelelangan di TPI Bulu Meduro mulai berjalan aktif kembali hingga sekarang.

Aktivitas pelelangan di TPI Bulu Meduro telah berjalan kembali setelah sempat tidak berjalan beberapa bulan. Akan tetapi hal tersebut bukan tanpa ada

masalah karena tidak semua kapal nelayan mengikuti pelelangan, masih ada nelayan yang melakukan penjualan ikan tanpa melalui proses pelelangan.

Melihat kondisi diatas, maka penelitian mengenai Peran Manajemen Pelelangan Ikan Terhadap Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan Di TPI Bulu Meduro perlu dilakukan, untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh TPI untuk menunjang produktivitas nelayan utamanya dalam pemasaran hasil tangkapan nelayan melalui pelelangan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memegang peran penting dalam suatu pelabuhan perikanan utamanya untuk memasarkan hasil perikanan dan menciptakan keteraturan jual beli antara nelayan dan bakul dengan adanya sistem pelelangan. Tidak berjalannya sistem lelang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak nelayan maupun pemerintah daerah, seperti permainan harga, pemasaran hasil tangkapan yang tidak maksimal sampai dengan penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk menjaga kelangsungan dan kesetabilan aktivitas pelelangan, dibutuhkan manajemen pengelolaan yang baik mulai dari petugas TPI, administrasi keuangan, ketersediaan fasilitas hingga mekanisme sistem pelelangan yang jelas agar nelayan dan petugas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pelelangan dapat melaksanakan tugas dengan baik tanpa ada yang dirugikan, seperti yang sebelumnya terjadi pada TPI Bulu Meduro dimana pelelangan sempat berhenti karena manajemen pengelolaan yang kurang baik. Dari pemaparan diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu Meduro Kabupaten Tuban?

2. Bagaimana perbedaan mekanisme sistem pelelangan tertutup dengan sistem pelelangan terbuka di Tempat Pelelangan Ikan Bulu Meduro Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana peran manajemen pelelangan ikan terhadap pemasaran hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Bulu Meduro Kabupaten Tuban?

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mempelajari dan mendeskripsikan manajemen Tempat Pelelangan Ikan Bulu Meduro Kabupaten Tuban.
2. Mendeskripsikan perbedaan sistem pelelangan tertutup dengan sistem pelelangan terbuka di Tempat Pelelangan Ikan Bulu Meduro Kabupaten Tuban.
3. Menganalisis peran manajemen pelelangan ikan terhadap pemasaran hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Bulu Meduro Kabupaten Tuban.

#### 1.4 Kegunaan

Upaya dilakukannya penelitian ini diharapkan berguna untuk:

##### 1. Lembaga Akademisi (Perguruan Tinggi dan Mahasiswa)

Kegunaan dalam penelitian ini pada akademisi sebagai sarana informasi dan pengembangan ilmu untuk menambah pengetahuan dan menghasilkan hipotesis baru dalam memahami penelitian tentang pengaruh manajemen pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terhadap pemasaran hasil perikanan.

##### 2. Pemerintah

Kegunaan dalam penelitian ini pada pemerintah adalah dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan tempat pelelangan ikan dan menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja apartur maupun fasilitas tempat pelelangan ikan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

##### 3. Masyarakat

Kegunaan dalam penelitian ini pada masyarakat adalah sebagai sarana informasi perihal sistem pelelangan ikan yang ada agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keberadaan TPI bagi pemasaran hasil perikanan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian Hendrik (2013), didapatkan suatu gambaran bahwa belum ada sistem pelelangan murni di TPI Tanjung Beringin karena keterbatasan karyawan termasuk tidak adanya juru lelang dan kurangnya beberapa fasilitas pada TPI sehingga TPI kurang efektif dalam menjalankan peranannya seperti yang diharapkan. Peran TPI dalam pemasaran ikan dilihat dari produksi armada, alat tangkap, dan jumlah nelayan yang mendaratkan ikan. TPI Tanjung Beringin memiliki peran relatif kecil dalam peningkatan kesejahteraan nelayan dan pemasaran hasil perikanan. TPI berperan sebesar 33,8% dalam pemasaran hasil perikanan Kecamatan Tanjung Beringin. Jumlah armada yang menjual ikan di TPI sebanyak 19,5%, alat tangkap 20,1% dan jumlah nelayan sebanyak 10,5%, jika dibandingkan dengan Kecamatan Tanjung Beringin. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, TPI hanya berperan sebesar 10,5% dalam memasarkan produksi ikan di Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan harga ikan di TPI berkisar antara Rp 6.000 untuk ikan campur dan Rp 15.000 untuk ikan kembung, sedangkan harga ikan diluar TPI lebih murah Rp 1.000 – Rp 2.000 per kilogram. Akan tetapi walaupun TPI belum berperan besar dalam pemasaran hasil perikanan, namun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan sebanyak 40% setiap tahunnya karena adanya peningkatan jumlah ikan yang didaratkan dan semakin meningkatnya harga jual ikan setiap tahun.

Hasil penelitian Dianto *et al.* (2015), memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan TPI Popoh belum berjalan dengan baik karena adanya kekurangan staf dan pergantian pengelola, sehingga penyelenggaraan pelelangan sekaligus

pengontrolan stabilitas harga ikan tidak terlaksana dengan baik dan pelelangan yang dilakukan tidak berjalan secara murni dimana terdapat kerjasama antar pedagang yang menguasai harga ikan di TPI Popoh sehingga hal ini merugikan nelayan karena adanya kecurangan yang dilakukan seperti ketika proses penimbangan ikan berat yang ditimbang tidak sesuai dengan hasil timbangan yang dicatat. Hasil tangkapan dijual langsung pada pengambang tanpa melalui pelelangan di TPI. Fungsi dari TPI Popoh menurut undang-undang Perda Bupati Tulungagung dibandingkan dengan kenyataan di lapang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Perda Bupati Tulungagung.

Dari penelitian yang dilakukan Satiarso *et al.* (2010), didapatkan hasil bahwa dari 9 TPI di Kabupaten Ciacap terdapat satu TPI, yaitu Pandanarang yang tidak efisien dengan tingkat efisiensi hanya 10,16%. Seangkan hasil analisis tingkat keberdayaan diperoleh informasi bahwa pengelola TPI telah memiliki tingkat keberdayaan yang tinggi dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan nelayan, dbuktikan dengan prosentase keberhasilan diatas 50% dalam hal pelayanan kepada nelayan, partisipasi organisasi dan kemamuan *loby* dengan *stakeholder*. Dan berdasarkan analisis SWOT TPI berada pada tingkat pertahanan dan memelihara.

Lubis *et al.* (2010), dalam penelitiannya menyatakan bahwa aktifitas pelelangan ikan di TPI PPN Pelabuhanratu tidak berjalan setelah mengalami pergantian pengelola meskipun retribusi tetap berjalan.hal ini disebabkan karena lemahnya manajemen dan permodalan KUD Mina Mandiri Sinar Laut, kemudian masih rendahnya kesadaran masyarakat kurangnya pengetahuan tentang pentingnya lelang, lalu adanya multifungsi serta usaha atau profesi sehingga menyulitkan peran seseorang dalam pelaksanaan lelang, dan adanya sistem langgan yang sulit diubah. Selain itu fasilitas yang ada pada dermaga bongkar tidak sesuai dengan fungsinya karena juga digunakan oleh nelayan untuk tempat

beristirahat kapal. Kebijakan yang ada untuk pelelangan belum memperjelas aturan-aturan untuk ikan yang diperbolehkan dilelang dan tidak. Tidak adanya mekanisme lelang memberikan dampak buruk bagi nelayan karena bargaining position nelayan semakin lemah sehingga pendapatannya menurun yang disebabkan oleh pedagang pengepul yang membeli ikan dengan harga ikan yang cukup rendah sedangkan harga ikan eceran yang di jual pengepul di kota cukup tinggi.

Dari hasil penelitian Satrio dan Christanto (2016), Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat pemasaran hasil tangkapan nelayan. Sesuai peraturan, nelayan hanya boleh menjual hasil tangkapannya melalui TPI. dengan demikian TPI dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan. Akan tetapi pemanfaatan TPI di Kecamatan Cilacap Selatan belum optimal dikarenakan masih adanya ketidak sesuaian antara peraturan pemerintah Kabupaten Cilacap dengan peraturan TPI terkait retribusi yang penarikannya lebih besar jumlahnya dari ketentuan yang tercantum pada peraturan pemerintah Kabupaten Cilacap, sehingga merugikan nelayan. Disamping itu pedagang yang mengikuti lelang hanya dari tingkat lokal sehingga persaingan harga masih kurang dan akibatnya harga ikan rendah dan berpotensi adanya permainan harga yang dilakukan oleh pedagang mengingat pada beberapa TPI di Kecamatan tersebut sistem lelangnya masih tertutup.

Hasil penelitian Sarwanto *et al.* (2014), menunjukkan bahwa pelaku usaha perikanan tangkap di Kabupaten Gunungkidul umumnya menjual hasil tangkapan dalam bentuk segar. Jenis ikan bernilai ekonomis tinggi sebagian besar dijual keluar wilayah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan ikan ekonomis rendah dijual untuk konsumsi lokal. Saluran pemasaran ikan segar secara garis besar dibagi menjadi 4 tipe yaitu; (1) Nelayan (istri nelayan sebagai pedagang)- konsumen, (2) Nelayan- pedagang pengepul- pengeceer- konsumen, (3) nelayan- pedagang

pengepul- restoran- pengunjung, (4) Nelayan- pedagang pengepul- pedagang antar provinsi/ industri. Sistem pemasaran ikan hasil tangkapan belum berjalan secara efisien, berdasarkan analisis margin pemasaran dan marker share menunjukkan saluran tipe 3 sebagai tipe saluran pemasaran utama paling tidak efisien dan margin pemasaran yang diterima lebih tinggi dibanding dengan yang diterima nelayan. Ini menunjukkan bahwa belum terjadi.

Tabel 1. Matrik Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.	Hendrik (2013)	Dari hasil penelitian terdapat beberapa kekurangan fasilitas pada TPI. Tinggi rendahnya harga ikan ditentukan oleh musim, dan ikan yang dijual oleh nelayan di TPI dipotong biaya retribusi sebesar 5% dan dibebankan pada pedagang. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa TPI memiliki peran relatif kecil dalam peningkatan kesejahteraan nelayan dan pemasaran hasil perikanan karena berbagai faktor. Akan tetapi sumbangan terhadap PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Lanjutan Tabel 1. Matrik Penelitian Terdahulu

2.	Evaluasi Kinerja Tempat Pelelangan (TPI) Dalam Menunjang Kesejahteraan Nelayan di Popoh, Desa Bosole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.	Muhammad Wahyu Dianto, Nuddin Harahab, Ismadi. (2015)	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pergantian pengelola. Pengelolaan TPI di Popoh belum terlaksana dengan baik, karena dari tenaga kerja atau staff masih kurang apalagi TPI belum lama dikelola oleh UPTD sehingga fungsi TPI sebagai penyelenggara pelelangan sekaligus pengontrol stabilitas harga ikan tidak terlaksana dengan baik, pelelangan yang ditawarkan di TPI Popoh tidak berjalan secara murni.</p> <p>Dari penghitungan yang dilakukan peneliti didapatkan hasil bahwa penerimaan keluarga nelayan belum mampu memenuhi kebutuhan subsisten hidupnya, walaupun semua kebutuhan atau pengeluaran untuk usaha perikanan tangkap dapat terpenuhi.</p>
3.	Analisis Efisiensi Teknis Pelelangan Ikan dan Strategi Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Cilacap.	Oke Satiarso, Neni Widayaningsih, Suharno. (2010)	<p>Hasil yang diperoleh dari analisis Linier rograming dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dari 9 TPI di Kabupaten Cilacap terdapat 1 TPI yang tidak efisien yaitu Pandanarang. Kemudian dari hasil analisis tingkat keberdayaan diperoleh informasi bahwa pengelola TPI/ KUD Kabupaten Cilacap telah memiliki tingkat keberdayaan yang tinggi dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan nelayan.</p> <p>Berdasarkan analisis SWOT, TPI Kabupaten Cilacap berada pada tingkat pertahankan dan memelihara.</p>

Lanjutan Tabel 1. Matrik Penelitian Terdahulu

4. Pengelolaan Aktifitas Pelelangan Ikan: Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu Sukabumi Jawa Barat.	Ernani Lubis, Wawan Oktariza, dan Hendri Dwiyanti. (2010)	<p>Aktifitas pelelangan ikan di TPI PPN Pelabuhanratu pada tahu 1993-2003 berjalan dengan baik ketika dikelola oleh DKP Pelabuhan Sukabumi. Akan tetapi sejak tahun 2004 semenjak pengelolaan beralih pada KUD Mina Mandiri Sinar Laut pelelangan ikan tidak berjalan kembali meskipun penarikan retribusi tetap dilakukan.</p> <p>Dampak pemasaran tanpa lelang yaitu pendapatan nelayan cenderung menurun karena adanya sistem langgan dan kelembagaan tengkulak yang membuat lemah posisi nelayan.</p> <p>Nilai riil retribusi (Nrr) yang diterima penyelenggara pelelangan berbeda jauh dengan retribusi yang seharusnya (Nrs) diterima. Nrr lebih kecil dar Nrs, hal ini dikarenakan yang terjadi di lapangan bukan hanya regular market tetapi juga cross market dan negotiation market.</p>
--	---	--



Lanjutan Tabel 1. Matrik Penelitian Terdahulu

5.	Peran Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan Terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.	Irvan Noor Satrio, Joko Christanto. (2016)	Hasil dari penelitian menunjukkan karakteristik TPI di Kecamatan Cilacap Selatan berbeda- beda terkait dengan fasilitas, sistem lelang, dan retribusi. Peran atau pemanfaatan TPI di Kecamatan Cilacap Selatan belum optimal dikarenakan masih adanya ketidak sesuaian antara peraturan pemerintah Kabupaten Cilacap dengan peraturan TPI terkait retribusi yang penarikannya lebih besar jumlahnya dari ketentuan yang tercantum pada peraturan pemerintah Kabupaten Cilacap, sehingga merugikan nelayan. Disamping itu pedagang yang mengikuti lelang hanya dari tingkat lokal sehingga persaingan harga masih kurang dan akibatnya harga ikan rendah dan berpotensi adanya permainan harga yang dilakukan oleh pedagang mengingat pada beberapa TPI di Kecamatan tersebut sistem lelangnya masih tertutup.
----	---	--	---

Lanjutan **Tabel 1.** Matrik Penelitian Terdahulu

6. Kajian Sistem Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY.	Catur Sarwanto, Eko Sri Wiyono, Tri Wiji Nurani, dan John Haluna. (2014)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan kabupaten Gunungkidul melakukan pemasaran dengan menjual hasil tangkapannya mealui TPI. Saluran pemasaran ikan segar secara garis besar dibagi menjadi 4 tipe.</p> <p>Sistem pemasaran ikan hasil tangkapan belum berjalan secara efisien, berdasarkan analisis margin pemasaran dan marker share menunjukkan saluran tipe 3 sebagai tipe saluran pemasaran utama paling tidak efisien dan margin pemasaran yang diterima lebih tinggi dibanding dengan yang diterima nelayan. Ini menunjukkan bahwa belum terjadi pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen.</p>
---	--	--

Sumber: Data Diolah (2018)

## 2.2 Manajemen

### 2.2.1 Definisi Manajemen

Pengertian manajemen menurut Winarno (2015), merupakan suatu proses pemanfaatan sumberdaya yang ada melalui tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk encapai tujuan yang telah ditentukan yang dapat diuraikan menjadi beberapa unsur pokok yaitu:

1. Bahwa manajemen selalu diterapkan pada suatu kelompok atau organisasi formal, dimana di dalamnya terdapat orang-orang yang saling mengikat diri;
2. Bahwa manajemen senantiasa memanfaatkan segenap sumber-sumber yang ada dalam proses kegiatannya;
3. Bahwa manajemen terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan;

4. Bahwa dalam manajemen senantiasa terdapat adanya tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan.

Solihin (2009), mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Definisi tersebut selaras dengan Saefullah dan Sule (2005), yang menyimpulkan bahwa manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

1. Adanya penggunaan sumberdaya organisasi, baik sumber daya manusia, maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

### **2.2.2 Tujuan Manajemen**

Setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan individu adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari hasil kerja yang dilakukan dan tujuan organisasi adalah mendapatkan laba (*business organization*) atau pelayanan (*public organization*) melalui proses manajemen. Tujuan yang ingin dicapai akan ditetapkan melalui perencanaan (*plan*), maka dari itu perencanaan harus ditetapkan dengan jelas, realistis dan menantang untuk diperjuangkan berdasarkan potensi yang dimiliki agar memunculkan usaha yang besar untuk mencapai target perencanaan tersebut. Sebaliknya jika tujuan dibuat terlalu mudah maka akan membuat motivasi untuk mencapainya menjadi rendah. Karena semangat kerja karyawan akan termotivasi apabila tujuan yang ditetapkan jelas, realistis dan menantang untuk dicapai (Winarno, 2015).

Dalam menentukan suatu tujuan haruslah didasari analisis data, informasi dan potensi yang dimiliki serta memilihnya dari alternatif yang ada. Tujuan organisasi dapat diketahui dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi tersebut. Menurut Hasibuan (2011), tujuan organisasi menurut tipeya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Profit objectives*, bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya
2. *Service objectives*, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan.
3. *Social objectives*, bertujuan meningkatkan nilai guna yang diciptakan untuk kesejahteraan.
4. *Personal objectives*, bertujuan agar karyawan secara *individual economic, sosial psychological* mendapatkan kepuasan di bidang pekerjaannya.

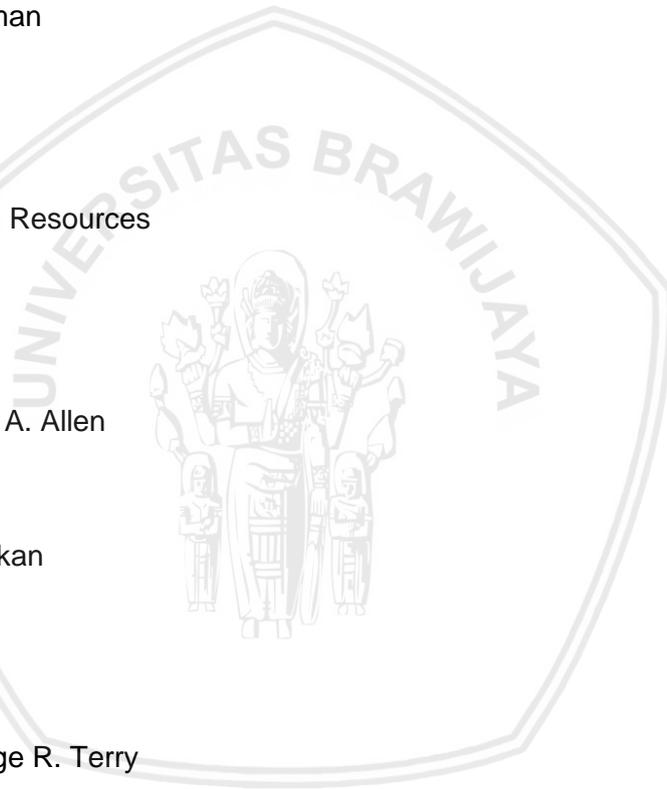
Dari apa yang dipaparkan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan adalah terjadinya proses manajemen dan aktivitas kerja dan harus ditetapkan secara jelas, realistis dan menantang berdasarkan pada analisis data, informasi dan alternatif yang ada.

### **2.2.3 Fungsi-fungsi Manajemen**

Fungsi-fungsi manajemen menurut Saefullah dan Sule (2005), adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Menurut Relawati (2012), adapun fungsi-fungsi manajemen yang harus dilaksanakan menurut beberapa ahli dirumuskan sebagai berikut:

1. Menurut Oey liang Lie
  - a. Perencanaan
  - b. Pengorganisasian
  - c. Pengarahan
  - d. Pengkoordinasian

- e. Pengawasan
- 2. Menurut Koontz O'donnel & Nielander
  - a. Perencanaan (*planning*)
  - b. Pengorganisasian (*organizing*)
  - c. Penyusunan (*staffing*)
  - d. Pengarahan (*directing*)
  - e. Pengawasan (*controlling*)
- 3. Menurut Newman
  - a. Planning
  - b. Organizing
  - c. Assembling Resources
  - d. Directing
  - e. Controlling
- 4. Menurut Louis A. Allen
  - a. Memimpin
  - b. Merencanakan
  - c. Menyusun
  - d. Mengawasi
- 5. Menurut George R. Terry
  - a. Planning
  - b. Organizing
  - c. Actuating
  - d. Controlling
- 6. Menurut Luther Gulick
  - a. Perencanaan (*planning*)
  - b. Pengorganisasian (*organizing*)
  - c. Pengadaan staf (*staffing*)



- d. Pengarahan (*directing*)
- e. Koordinasi (*coordinating*)
- f. Pelaporan (*reporting*)
- g. Pembelanjaan (*budgeting*)

Dari beberapa pendapat ahli yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada lima macam fungsi manajemen yang harus dilakukan. Kelima fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan (*planning*)

Purwanti dan Fattah (2012), mendefinisikan perencanaan sebagai proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perbedaan pelaksanaan adalah hasil tipe dan tingkat perencanaan yang berbeda pula. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sebenarnya hanya melaksanakan keputusan-keputusan perencanaan.

#### 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Purwanti dan Fattah (2012), menjelaskan pengorganisasian merupakan fungsi manajemen berkaitan dengan penentuan dan pengelompokan tugas ke dalam departemen, serta alokasi sumber daya ke dalam departemen yang umumnya dilakukan setelah perencanaan dan mencerminkan bagaimana perusahaan mencoba untuk mencapai rencananya.

#### 3. Pengimplementasian/ pengarahan (*Directing*)

Pengimplementasian menurut Dianto *et al.* (2015), merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas

yang tinggi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Relawati (2012), yang menyatakan bahwa pengarahan merupakan pemberian instruksi resmi dari manajer kepada para bawahan agar mau melaksanakan tugas yang dibebankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 4. Pengawasan (*controlling*)

Dianto *et al.* (2015), menerangkan bahwa pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi. beberapa kegiatan yang terkait dengan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target.

### 2.3 Manajemen TPI

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menurut Peraturan Daerah (perda) Propinsi Jawa timur nomor 14 tahun 1998 adalah tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran. Agar tujuan didirikannya TPI tercapai maka diperlukan suatu organisasi yang bertugas mengelola kegiatan TPI agar penyelenggaraan pelelangan dapat berjalan dengan baik. Dan untuk menjalankan organisasi harus

ada manajemen agar organisasi tersebut dapat berjalan atau mencapai tujuannya. Purwanti dan Fattah (2012), menjelaskan bahwa kegiatan manajemen sangat berkaitan erat serta tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan untuk berhubungan dengan orang lain. Bahkan suksesnya suatu tujuan organisasi akan dapat lebih mudah dicapai bila dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh anggota manajemen. Dengan demikian, aspek pokok dalam manajemen adalah mengenali peranan dan pentingnya orang lain.

Banyak ahli manajemen mengemukakan pendapatnya tentang apa itu manajemen, salah satunya adalah Terry (2008), yang mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses yang terdiri tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan sebuah sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

Penelitian yang dilakukan Dianto *et al.* (2015), melaporkan bahwa perencanaan yang diterapkan di TPI Popoh Kabupaten Tulungagung berupa menetapkan tujuan dan target. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan targetnya berupa menyusun rencana kegiatan dengan melakukan pembinaan karyawan TPI oleh pimpinan TPI. Penorganisasian yang dilakukan menggunakan struktur organisasi lini karena mudah diterapkan, sederhana, dan tidak mahal. Dengan demikian dasar-dasar pokok pembentukan ditentukan dengan memperhatikan tujuan TPI, penentuan garis pengawasan yang jelas, menentukan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi agar penerapan fungsi manajemen dapat tercapai. Kemudian pengendalian dan pengawasan dilakukan dengan melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan penyeteroran retribusi terhadap pelaksana penyelenggara.

## 2.4 Masyarakat Nelayan

Satria (2002), mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama hidup bersama, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian kegiatannya didalam kelompok tersebut. Muluk (1996), menyatakan bahwa klasifikasi masyarakat dapat dibedakan berdasarkan mata pencaharian utamanya atau berdasarkan sifat mereka bermukim. Dengan demikian, masyarakat nelayan atau pesisir dapat diartikan sekelompok manusia yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dan memanfaatkan sumberdaya pesisir atau laut sebagai pekerjaannya.

Kusnadi (2009), Nelayan adalah orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama dalam masyarakat.

### 2.4.1 Hubungan Nelayan dengan Tengkulak

Tengkulak merupakan instrumen sosial ekonomi yang penting dalam menjaga kelangsungan usaha perikanan nelayan, seperti kasus di Palang, Tuban, langkah kreatif tengkulak untuk mencari pangsa pasar baru ternyata berimplikasi terhadap pengurangan intensitas konflik nelayan trawl dengan nelayan tradisional (Kusnadi, 2004).

Terdapat hubungan yang erat dan hubungan yang saling menguntungkan antara nelayan dengan tengkulak, dimana terjadi jalinan utang-piutang antara tengkulak dengan nelayan. Para nelayan diberikan bantuan modal untuk melaut dan biasanya hutang perbekalan melaut itu dibayarkan oleh nelayan dalam

bentuk hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan, dan pihak tengkulak mendapatkan keuntungan dari harga beli ikan yang lebih rendah dari nelayan yang diberikan pinjaman modal. Pada musim paceklik dipastikan utang nelayan tidak akan dikembalikan karena pada musim tersebut hampir semua nelayan tidak melaut (Kusnadi, 2004).

Hubungan antara nelayan dengan tengkulak tidak selamanya merugikan nelayan, namun ada juga yang terbentuk mutualisme yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak. Dimana seorang tengkulak melakukan kesepakatan dengan nelayan, tengkulak memberikan modal kepada nelayan akan melaut dengan syarat ikan hasil tangkapan harus dijual kepadanya, dimana 80% hasil tangkapan untuk tengkulak, 20% untuk nelayan, dan nelayan juga tidak merasa terpaksa menjual ikan hasil tangkapannya (Mubyarto, 1995).

Peranan tengkulak akan tetap berpengaruh bagi nelayan, sepanjang kehadiran TPI/KUD mina tidak memberi kemudahan dan keringanan usaha nelayan. Lembaga-lembaga pemerintah juga tidak memiliki tingkat kreativitas yang tinggi sebagaimana ditemukan pada tengkulak (Kusnadi, 2004).

#### **2.4.2 Hubungan Nelayan dengan TPI**

Fungsi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah menarik sejumlah pembeli sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang baik serta dapat menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Terdapat banyak TPI yang dibangun di Pulau Jawa untuk menjaga harga ikan sesuai dengan penawaran dan permintaannya sehingga terjadi persaingan pasar yang sehat tanpa merugikan pihak manapun.

Menurut Munir (1993), Proses penentuan harga ikan di TPI PPNP dilakukan melalui kekuatan penawaran dan permintaan antara nelayan yang diwakili sepenuhnya oleh TPI (juru tawar) dengan pedagang peserta lelang. Pelaksanaan pelelangan di TPI PPNP dapat dikatakan mendekati pelelangan

murni, hal ini dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri pelelangan murni. Ciri dari pelelangan murni adalah barang atau produk yang dijual bersifat homogen dan berjumlah banyak, dengan jumlah penjual dan pembeli banyak dan penentuan harga dari luar relatif kecil.

Sedangkan menurut Lubis *et al.* (2012), Aktivitas pelelangan ikan di TPI PPN Palabuhanratu periode 1993-2003 dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi. Pelelangan pada periode tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan praktek lelang yang seharusnya. Aktivitas penjualan ikan dilakukan di depan khalayak umum, penawar dengan harga tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang sehingga nelayan merasakan fungsi adanya TPI dan proses lelang yang dijalankan. Nelayan dan bakul merasa puas atas pelayanan pemasaran yang diberikan karena saling mengetahui harga jual yang berlaku di pasaran sehingga memperoleh manfaat dengan adanya pelelangan tersebut.

Tahun 2004 hingga sekarang, pengelolaan mekanisme pelelangan beralih kepada KUD Mina Mandiri Sinar Laut. Pada awalnya pengelolaan pelelangan ikan berjalan lancar, namun pada pertengahan tahun 2005 hingga saat ini pelelangan tidak berjalan. TPI tidak dipergunakan sebagaimana mestinya secara optimal sehingga memungkinkan terjadi pasar perdagangan ikan yang monopolistik (Lubis *et al.*, 2012).

Sebenarnya nelayan sangat bergantung kepada TPI untuk menjual hasil tangkapannya kepada konsumen atau pembeli dengan harga yang sesuai. Apabila TPI tidak berjalan sesuai fungsinya nelayan akan merugi, karena terpaksa menjual ikan kepada tengkulak yang harga belinya rendah dan terkadang dengan sistem hutang. Diperlukan peran pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya pelelangan ikan di TPI yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan untuk kepentingan bersama.

### 2.4.3 Pendapatan Nelayan

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat atau perlengkapan ke dalam kapal atau perahu tidak termasuk dalam kategori nelayan (Yustiarani, 2008).

Berdasarkan sumber pendapatannya, menurut Hidayatullah (2013), nelayan dapat dibagi menjadi 4 yaitu :

1. Nelayan tetap atau nelayan penuh, yakni nelayan yang pendapatan seluruhnya berasal dari perikanan.
2. Nelayan sambilan utama, yakni nelayan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari perikanan.
3. Nelayan sambilan tambahan, yakni nelayan yang sebagian kecil pendapatannya berasal dari perikanan.
4. Nelayan Musiman, yakni orang yang dalam musim-musim tertentu saja aktif sebagai nelayan.

Faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan adalah produksi melaut, curahan waktu kerja produktif, dan biaya produksi atau biaya operasional melaut. Faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan produksi melaut adalah aset kapal, jenis alat tangkap, mutu SDM, harga ikan, daerah penangkapan ikan, dan pengembangan usaha pasca panen dalam rumah tangga. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap penurunan produksi hasil penangkapan ikan adalah bahan bakar minyak (BBM). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya melaut adalah aset kapal, alat tangkap, mutu hasil, dan mutu SDM.

Berdasarkan perahu/kapal penangkap yang digunakan. Nelayan berperahu tak bermotor yang terdiri dari nelayan Jukung, nelayan perahu papan

(kecil, sedang dan besar), nelayan berperahu motor tempel. Nelayan berkapal motor, menurut GT (Gross Ton) terdiri dari:

1. < 5 GT
2. 5-10 GT
3. 10-20 GT
4. 20 - 30 GT
5. 30 - 50 GT
6. 50 - 100 GT
7. 100 - 200 GT
8. 200-500 GT
9. > 500 GT

Menurut statusnya, nelayan dapat dibagi menjadi; (1) Nelayan Pemilik, terbagi menjadi nelayan pemilik perahu tak bermotor, dan nelayan pemilik kapal motor yang sering disebut toke, (2) Nelayan Juragan, adalah pengemudi pada perahu bermotor atau sebagai kapten kapal motor, (3) Nelayan buruh, adalah pekerja penangkap ikan pada perahu motor atau pada kapal motor.

Pendapatan nelayan berasal dari dua sumber, yaitu: pendapatan dari usaha penangkapan ikan dan pendapatan dari luar usaha penangkapan ikan. Sumber pendapatan utama bagi nelayan berasal dari usaha penangkapan ikan sedangkan pendapatan dari luar usaha penangkapan ikan, biasanya lebih rendah (Yustiarani, 2008).

## **2.5 Tempat Pelelangan Ikan**

TPI jika ditinjau dari manajemen operasi, maka TPI merupakan tempat penjual jasa pelayanan antara lain sebagai tempat pelelangan, tempat perbaikan jaring, tempat perbaikan mesin dan lain sebagainya. Disamping itu TPI merupakan tempat berkumpulnya nelayan dan pedagang-pedagang ikan atau

pembeli ikan dalam rangka mengadakan transaksi jual beli ikan. Nelayan ingin menjual hasil tangkapan ikannya dengan harga sebaik mungkin, sedangkan pembeli ingin membeli dengan harga serendah mungkin. Untuk mempertemukan penawaran dan permintaan itu, diselenggarakan pelelangan ikan agar tercapai harga yang sesuai, sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan (Hidayatullah, 2013).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), selain merupakan pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya, juga menjadi tempat untuk memperbaiki jaring, motor, serta kapal dalam persiapan operasi penangkapan ikan. Tujuan utama didirikannya TPI adalah untuk menarik sejumlah pembeli sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang baik serta dapat menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Secara fungsional, sasaran yang diharapkan dari pengelolaan TPI adalah tersediannya ikan bagi kebutuhan penduduk dengan kualitas yang baik serta harga yang wajar. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengelolaan TPI yang baik dan profesional akan memotivasi para nelayan untuk menambah dan mengembangkan usaha di bidang perikanan (Hidayatullah, 2013).

Peranan Tempat Pelelangan Ikan menurut perundangan yang berlaku tertuang dalam UU No 31 tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak). Pemerintah dalam hal ini berperan untuk menyediakan prasarana pendukung aktivitas usaha nelayan khususnya nelayan tangkap. Salah satu sarana pendukungnya adalah penyediaan Tempat Pelelangan ikan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2015, disebutkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai bagian dari

urusan pemerintah konkuren yaitu tergolong dalam urusan pemerintah pilihan bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Tuban sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah maka perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Menurut Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelelangan ikan, bahwasanya Kepala Dinas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelelangan ikan, penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh UPTD sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.

Peran TPI Bulu Meduro diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat khususnya nelayan, karena dengan adanya TPI, harga ikan dapat stabil, dan tanpa adanya kecurangan dari pihak TPI maupun bakul. Karena tujuan didirikannya TPI adalah sebagai institusi perantara yang berperan untuk mendapatkan pembeli potensial sebanyak mungkin guna menjual hasil tangkapan nelayan dengan harga tinggi, tanpa merugikan pedagang pengepul. Selain itu didirikannya TPI dimaksudkan pula agar nelayan mendapatkan harga pembayaran secara tunai atas harga yang wajar, disamping sebagai pendapatan daerah.

## **2.6 Pelelangan Ikan**

Pelelangan ikan diselenggarakan oleh penyelenggara lelang secara terbuka diantara penjual dan pembeli yang dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah dan diharapkan akan dapat menguntungkan kedua belah pihak baik nelayan maupun tengkulak. Lembaga pelelangan merupakan lembaga yang membantu nelayan dalam memasarkan ikan hasil tangkapannya

melalui pelelangan, disamping sebagai tempat pemungutan retribusi hasil tangkapan sekaligus sebagai pengendali harga (Yustiarani, 2008).

Secara umum pelelangan ikan diartikan sebagai suatu metode transaksi di pusat produksi yang diselenggarakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) antar nelayan dan bakul dengan tujuan agar dapat diperoleh harga yang wajar serta pembayaran secara tunai kepada nelayan. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat. Bakul adalah pemenang lelang di TPI (Perda Nomor 08 Tahun 2011 Kabupaten Tuban).

Mekanisme lelang di TPI Bulu Meduro, dilakukan penawaran harga ikan secara terbuka kepada para calon pembeli dengan lelang murni, penawaran sesuai dengan harga standar pasar. Penentuan pemenang lelang yaitu penawar terakhir dengan penawaran tertinggi yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang, kemudian pemenang lelang mendapatkan karcis lelang dari juru tulis yang harus segera menyetorkan uang pembelian ikan beserta karcis lelang kepada kasir di Tempat Pelelangan Ikan. Selain itu juga masih terdapat pelelangan tertutup dimana penjualan ikan dilakukan di dermaga bongkar muat oleh nelayan dan bakul secara langsung dengan tetap membayar retribusi kepada TPI sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2.7 Retribusi**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada beberapa jenis retribusi, diantaranya : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Undang-Undang No. 34/2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 66/2001 tentang Retribusi Daerah, maka retribusi TPI merupakan jenis dari retribusi jasa usaha (Sutami, 2012).

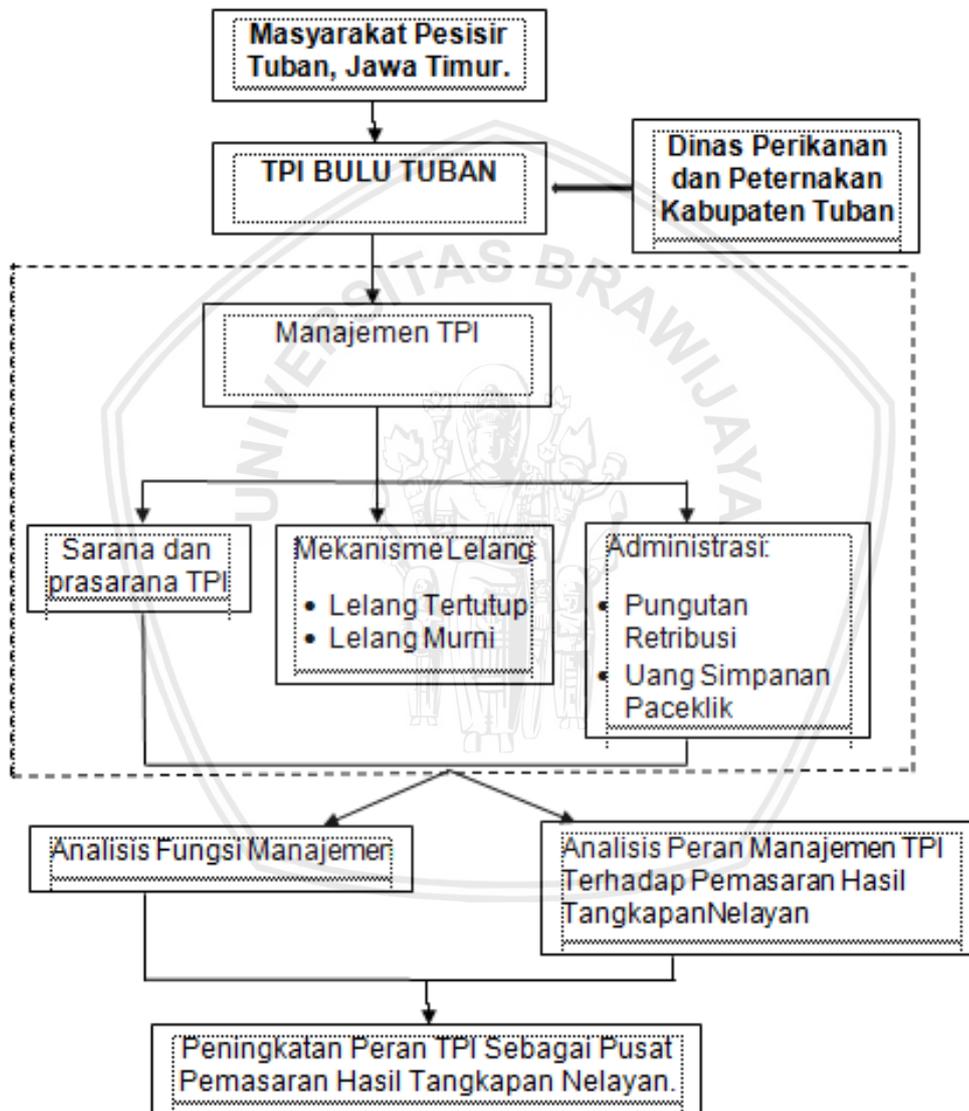
Pemungutan retribusi lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban tertuang dalam Peraturan Bupati No. 49 tahun 2014 BAB IV pasal 5 tentang struktur dan besarnya tarif yang berbunyi:

1. Setiap pengguna tempat pelelangan dikenakan retribusi
2. Besarnya tarif retribusi untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan ditetapkan dari harga transaksi penjualan, dengan ketentuan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari nelayan/petani ikan (penjual), dan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari pedagang/bakul (pembeli) ikan.

Dalam upaya peningkatan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan nelayan, serta untuk menciptakan harga yang layak bagi konsumen sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semua hasil penangkapan ikan di laut perlu dijual secara lelang di tempat pelelangan ikan (TPI). Pelaksanaan pelelangan ikan dapat menciptakan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen, pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Fungsi retribusi pelelangan ikan secara langsung adalah sebagai pemasukan pendapatan bagi kas daerah dan pendapatan bagi pihak yang berperan sebagai penyelenggara pelelangan ikan dan secara tidak langsung adalah untuk mensejahterakan para nelayan, karena pada saat nelayan melaksanakan pelelangan ikan, mereka membayar retribusi, dan retribusi itulah yang nantinya akan kembali lagi ke mereka dalam bentuk fasilitas maupun bantuan dana sosial.

## 2.8 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dari penelitian tentang Pengaruh Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Terhadap Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu Meduro, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan pemasaran hasil tangkapan nelayan melalui pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan di TPI Bulu Meduro diselenggarakan langsung oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban yang pelaksanaannya adalah UPTD Perikanan yang dibantu oleh administratur TPI. aktivitas pelelangan di TPI berjalan aktif semenjak Dinas melakukan perbaikan pada pengelolaan TPI setelah sempat tidak beroperasi akibat pengelolaan yang tidak terorganisir dengan baik dan retribusi yang jumlahnya dianggap memberatkan nelayan sehingga mereka tidak mau mengikuti lelang. Akan tetapi meskipun telah dilakukan perbaikan dan lelang sudah berjalan aktif, ternyata masi ada beberapa kendala yang ditemukan di lapang, seperti belum semua kapal mengikuti pelelangan dan ketidak tertiban bakul dalam melakukan pembayaran atas borongan yang dilakukan dalam pelelangan. Hal ini dapat menimbulkan resiko kerugian pada nelayan karena penawaran harga ikan bisa lebih rendah sehingga berpengaruh pada penurunan pendapatan nelayan maupun terjadinya kesenjangan sosial akibat adanya permainan harga yang dilakukan tengkulak, dan persoalan ketidak tertiba pembayaran oleh bakul menyendat pembayaran hasil penjualan nelayan. Oleh karena hal tersebut perlu dilakukan analisis fungsi manajemen dan analisis peran manajemen pada manajemen TPI agar TPI dapat meningkatkan perannya sebagai pusat pemasaran hasil tangkapan nelayan yang mampu memberikan keteraturan dalam jual beli sehingga nelayan terhindar dari kerugian dan dapat melakukan penjualan hasil tangkapannya dengan maksimal.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Bulu Meduro Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, Jawa Timur dilaksanakan mulai Bulan November sampai dengan bulan Desember 2018.

#### 3.2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Menurut Yin (2009), studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah- masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer.

Studi Kasus digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan, menjelaskan tentang seberapa besar peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bagi nelayan, dan menjelaskan kekurangan maupun kelebihan TPI dalam melayani masyarakat nelayan di Desa Bulu. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam permasalahan khusus, sehingga diperoleh gambaran secara jelas dan lengkap mengenai masalah tersebut.

#### 3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan sebagai narasumber yang dianggap paling tahu dengan apa yang kita inginkan sehingga memudahkan untuk menjelajahi obyek yang diteliti (Sugiyono, 2010).

*Purposive sampling* (metode bertujuan) dipilih melalui pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian dan lebih pada kehendak untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang sesuatu hal melalui wawancara secara mendalam dengan informan. Adapun informan yang ditentukan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tabel Informan Penelitian

No	Informan
1	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.
2	Kepala UPTD Kecamatan Bancar
3	Kepala administratur TPI Bulu Meduro

Sumber: Data Diolah (2018)

Dari Tabel 2 diatas peneliti akan menjelaskan pertimbangan pengambilan sampel informan pada penelitian ini:

1. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban adalah pembuat kebijakan pengelolaan perikanan di Kabupaten Tuban. Dalam tingkatan manajemen peranan tersebut disebut *top manajemen* (manajemen puncak). Keahlian yang dimiliki manajer tingkat puncak adalah konseptual yang membuat dan merumuskan konsep untuk dilaksanakan oleh tingkatan dibawahnya. Dari tingkatan ini peneliti memperoleh informasi kebijakan seperti apa yang dibuat untuk pengelolaan perikanan khususnya TPI di Kabupaten Tuban. Dan bagaimana pengorganisasian yang dilakukan dari atas untuk pelaksanaan maupun pengawasan jalannya kebijakan tersebut.
2. Kepala UPTD Kecamatan Bancar adalah orang yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Pada tingkatan manajemen disebut *middle management* (manajemen menengah) yang memiliki keahlian untuk berkomunikasi, bekerjasama dan memotivasi orang lain. dari Kepala UPTD peneliti mendapatkan informasi pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan mulai dari penerapan

hingga pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pencapaian target yang diharapkan.

3. Kepala Administratur TPI yang berperan sebagai manajer TPI yang memiliki tanggungjawab menyelesaikan rencana yang telah ditetapkan oleh manajer yang lebih tinggi. Pada tingkatan ini disebut dengan *low management* (manajemen tingkat bawah) pada tingkatan ini orang tersebut memiliki keahlian di bidang teknis yang mencakup prosedur, teknis dan pengetahuan lapang, sehingga peneliti mendapatkan informasi terkait penerapan perencanaan yang dilakukan di lapang mulai dari prosedur yang dilakukan, teknis pelelangan dan keadaan lapang termasuk kendala yang terjadi di lapang secara langsung.

Teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada mulanya berjumlah sedikit kemudian lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari sumber data yang sedikit tadi belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2010).

Teknik *Snowball sampling* digunakan untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan nelayan dan bakul. Pada awalnya peneliti melakukan wawancara dengan bakul atas rekomendasi dari administratur, kemudian dari satu bakul peneliti mendapatkan rekomendasi ke bakul yang lain. hal yang sama juga berlaku untuk mendapatkan informan dari nelayan juragan dan nelayan buruh. Selain itu peneliti juga mencari informan secara acak kepada masyarakat untuk mengetahui responnya, seperti tanya jawab dengan pemilik warung yang berjualan di area TPI untuk mencari sudut pandang lain terkait kondisi sosial di TPI Bulu Meduro serta sebagai langkah klarifikasi terhadap data yang didapat dari wawancara sebelumnya agar data lebih valid. Cara ini dilakukan secara berkala samapai data yang dikumpulkan kredibel.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi sumber data.

#### **3.4.1 Observasi**

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap situasi yang kompleks dan merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis yang mengutamakan pengamatan dan ingatan. Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu benda, kondisi atau situasi, proses atau perilaku (Sugiyono, 2010).

Observasi dilakukan secara menyeluruh terhadap obyek-obyek yang dianggap penting di dalam TPI Bulu Meduro maupun di luar TPI Bulu Meduro sehingga dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain. Peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga diperoleh pandangan secara holistik atau menyeluruh terhadap kondisi lapang.

#### **3.4.2 Wawancara**

Sugiyono (2010), menyatakan bahwa wawancara bertujuan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti akan mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang akan dikemukakan oleh informan.

Penelitian dilakukan dengan melakukan proses wawancara terarah untuk mendapatkan informasi yang tepat. Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung atau wawancara kepada pihak instansi yang terkait dengan penelitian tersebut. Wawancara

dilakukan kepada bakul, nelayan juragan, nelayan buruh, pihak TPI, UPTD, dan juga Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban.

### **3.4.3 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Penggunaan dokumen adalah untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Teknik studi dokumentasi dilakukan dengan mengaitkan data primer yang diperoleh di lapang serta informasi-informasi yang diperoleh dari narasumber. Hasil penelitian akan lebih kredibel dengan didukung adanya data yang berhubungan dengan aktivitas TPI, data keadaan wilayah Desa Bulu dan data produksi TPI.

### **3.4.4 Triangulasi**

Sugiyono (2010), menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. Prastowo (2006), membedakan teknik ini menjadi 5 macam yaitu:

1. Triangulasi sumber yang merupakan teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi teknik merupakan teknik pengecekan kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

3. Triangulasi waktu merupakan suatu teknik pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
4. Triangulasi penyidik merupakan teknik pengecekan kredibilitas dengan cara memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.
5. Triangulasi teori yaitu pengecekan kredibilitas dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa datatemuan peneliti.

Dalam penelitian ini jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber untuk menguji kredibitas data dengan melakukan pengecekan terhadap data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Menurut (Moleong, 2005) hal tersebut dapat tercapai dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Kemudian berdasarkan pada hipotesis tersebut dilakukan pencarian data lagi secara berulang sehingga dapat disimpulkan

apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.apabila berdasarkan data yang telah terkumpul dengan teknik triangulasi dinyatakan diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi sebuah teori. Pada analisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010) yang terdiri dari tiga hal yaitu :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian tersebut berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah reduksi data selanjutnya berupa membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat partisi, menulis memo, dan sebagainya. Reduksi data terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun.

#### 2. Penyajian Data

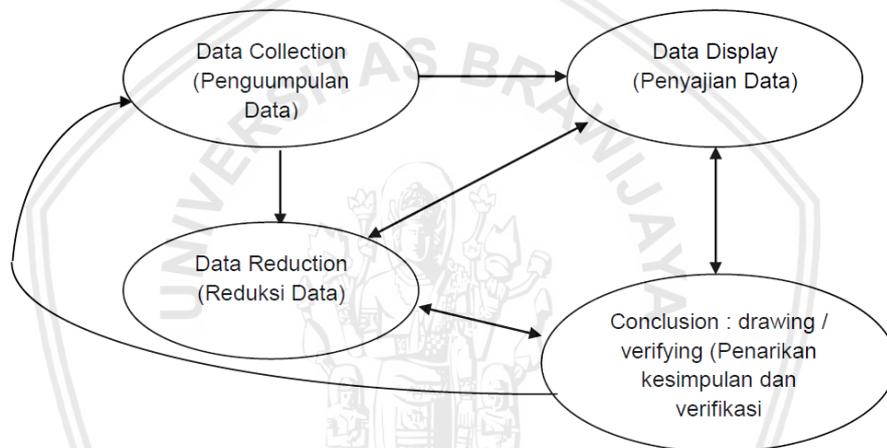
Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Supaya sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matriks, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan narasumber tentang apa yang terjadi. Data tersebut disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

#### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola- pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

Kesimpulan yang ditarik segera di verifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat, selain itu juga dapat dilakukan dengan cara berdiskusi, hal tersebut dilakukan supaya data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan ditarik menjadi kokoh.

Berikut merupakan gambar mengenai komponen dalam analisis data yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data  
(Sugiyono,2010)

Dari pemaparan dapat diambil kesimpulan bahwa analisis data merupakan proses mencari data kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapang, dan dokumentasi disusun secara sistematis dengan dikelompokkan kedalam kategori, lalu dijabarkan kedalam unit-unit dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, lalu membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

## 4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 4.1 Letak Geografis dan Topografi

Penelitian dilakukan di TPI Bulu Meduro yang berada di Jalan Raya Tuban-Semarang km 45 Desa Bulumeduro, Kecamatan bancar, Kabupaten Tuban dengan posisi koordinat  $06^{\circ}45'11''\text{LS}$  dan  $111^{\circ}32'52''\text{BT}$ , dan posisi geografis yang berjarak 145 km dari ibu kota provinsi Jawa Timur, 45 km dari kota kabupaten, 8 km dari kota kecamatan sehingga sangat strategis karena letaknya dekat dengan jalan pantura sehingga mobilitas sangat mudah.

Secara topografis ketinggian Desa Bulumeduro berupa daratan yang memiliki ketinggian sekitar 3 m diatas permukaan air laut, yang memiliki luas administrasi 4,5 Ha. Desa Bulumeduro merupakan daerah pesisir yang hampir tidak memiliki lahan untuk kegiatan pertanian. Batas wilayah desa Bulumeduro terbagi menjadi empat yaitu:

- Sebelah utara : berbatasan dengan laut Jawa
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Banjarjo
- Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Boncong
- Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Bulujowo

### 4.2 Sejarah Desa Bulumeduro

Dahulu kala terdapat sebuah daerah yang terletak di utara Pulau Jawa. Daerah tersebut merupakan perkampungan pesisir yang berda diperbatasan anantara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Pada umumnya penduduk perkampungan pesisir tersebut mata pencahariannya berasal dari melaut, sehingga 80% penduduknya merupakan nelayan. Sedangkan 20% penduduk perkampung pesisir tersebut sebagai petani. Semakin lama jumlah masyarakat kampung pesisir tersebut meningkat, sehingga mulai timbul antusias masyarakat

untuk menamai kampung pesisir yang merikat tempati. Suatu hari ketika seorang petani berada di ladangnya menemukan keanehan, yaitu pohon yang ada diladangnya tiba – tiba memiliki bulu. Keanehan tersebut menjadi buah bibir yang hangat di desa pesisir tersebut, sehingga masyarakat pekampungan tersebut sepakat untuk menamai desanya dengan nama Bulu.

Beberapa tahun kemudian datanglah kelompok pedagang Madura ke Desa Bulu tersebut. Barang dagangan yang dijual oleh orang Madura tersebut berupa pakaina, perhiasan, dan lain – lain. Awalnya kelompok Madura tersebut hanya singgah untuk berjualan tetapi lama – kelamaan kelompok Madura tersebut merasa betah di Desa Bulu karena mereka merasa di Desa Bulu merupakan tempat yang cocok dan menguntungkan untuk berdagang. Hal tersebut membuat kelompok Madura tinggal menetap hingga berkeluarga dengan penduduk Desa Bulu.

Beberapa tahun kemudian terbentuklah dua komunitas, yaitu “bulujowo” dan “bulumeduro”. Bulujowo dihuni oleh penduduk asli suku Jawa, sedangkan Bulumeduro dihuni oleh penduduk yang berturunan Jawa dan Madura. Dulu Desa Bulumeduro merupakan wilayah yang cukup luas, namun adanya abrasi air laut dan pemekaran wilayah desa – desa lain menyebabkan berkurangnya luas wilayah Desa Bulumeduro. Desa Bulumeduro memiliki dua dusun, yaitu Dusun Bulumeduro dan Dusun Binangun. Sejak terbentuknya pemerintahan Desa Bulumeduro (1928) telah mengalami pergantian kepala desa sebanyak enam kali dengan rincian berikut:

- Tahun 1928 – 1944 : Sodik
- Tahun 1945 – 1994 : Misbah
- Tahun 1995 – 2003 : Bakrudin, S.E
- Tahun 2004 – 2006 : Roqib

### 4.3 Keadaan Penduduk Desa Bulu Meduro

Berdasarkan dari data administrasi Pemerintah desa tahun 2018 jumlah penduduk Desa Bulumeduro terdiri dari 362 KK dengan jumlah total 1254 jiwa dengan rincian 606 laki-laki dan 648 perempuan. penduduk Desa Bulumeduro mayoritas adalah keturunan Jawa dan Madura yang bermukim secara turun temurun. Penduduk Desa Bulumeduro dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, dan keluarga sejahtera III. Secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Bulumeduro sebanyak 75% digolongkan kedalam keluarga miskin. Pada Tabel 4 disajikan pembagian penduduk Desa Bulumeduro berdasarkan penggolongan usia.

Tabel 3. Data Penduduk Desa Bulumeduro Berdasarkan Penggolongan Usia

No.	Usia (tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	0 – 5	20	28	48	3,83
2.	6 – 10	34	39	73	5,82
3.	11 – 15	39	36	75	5,98
4.	16 – 20	54	56	110	8,77
5.	21 – 25	50	45	95	7,56
6.	26 – 30	54	58	112	8,93
7.	31 – 35	92	95	187	14,91
8.	36 – 40	80	75	155	12,36
9.	41 – 45	62	73	135	10,77
10.	46 – 50	33	48	81	6,46
11.	51 – 55	30	20	50	3,99
12.	56 – 60	23	35	58	4,63
13.	> 60	35	40	75	5,98
<b>Total</b>		<b>606</b>	<b>648</b>	<b>1254</b>	<b>100</b>

Sumber: Kantor Desa Bulumeduro, 2018

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebanyak 78,39% penduduk Desa Bulumeduro merupakan penduduk usia produktif atau angkatan kerja (15-60 tahun). Jumlah penduduk paling sedikit adalah anak-anak yang masih balita sebanyak 3,83% dan didominasi oleh kelompok masyarakat berusia 31-35 tahun sebesar 14,91%.

#### 4.3.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga Desa Bulumeduro dapat dikelompokkan dalam beberapa sektor yaitu perikanan, jasa, perdagangan, industri rumah tangga dan lain-lain. pada Tabel 4 disajikan data penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Bulumeduro

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Perikanan	628	89,44
2.	Jasa / Perdagangan		
	• Jasa Pemerintahan	8	1,14
	• Jasa Perdagangan	24	3,42
	• Jasa Angkutan	12	1,71
	• Jasa Keterampilan	9	1,28
	• Jasa Lainnya	3	0,43
3.	Sektor Industri	-	-
4.	Sektor lain	18	2,57
	<b>Total</b>	<b>701</b>	<b>100</b>

Sumber: Kantor Desa Bulumeduro, 2018

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Bulumeduro masih didominasi oleh bidang perikanan sebanyak 89,44% karena daerah Desa ini merupakan daerah pesisir sehingga kebanyakan dari masyarakat setempat menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Sedngan pada urutan kedua, matapencaharian yang ukup banyak adalah perdagangan, dan pada umumnya yang diperdagangkan adalah ikan hasil tangkapan.

#### 4.3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mendongkrak kecakapan masyarakat. Apabila suatu daerah memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka kesejahteraan daerah akan lenih tinggi dibandingkan dengan daerah yang tinkat pendidikan penduduknya rendah. Pada Tabel 6 disajikan data tingkat pendidikan penduduk Desa Bulumeduro.

Tabel 5. Tingkatan Pendidikan Penduduk Desa Bulumeduro

No	Keterangan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Buta Huruf Usia 10 Tahun Keatas	104	8,29
2.	Pra-sekolah	22	1,75
3.	Tidak Tamat SD	211	16,23
4.	Tamat SD	313	24,96
5.	Tamat SMP	348	27,75
6.	Tamat SMA	223	17,83
7.	Tamat Perguruan Tinggi / Akademi	33	2,63
<b>Total</b>		<b>1254</b>	<b>100</b>

Sumber: Kantor Desa Bulumeduro, 2018

Dari data yang disajikan pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Buumeduro masih tergolong rendah. Hal ini terbukti dari data jumlah penduduk terbanyak hanya tamatan SMP. Sedangkan penduduk yang berpendidikan tinggi (Perguruan Tinggi/ Akademisi) masih sejumlah 2,63% dari total peduduk Desa Bulumeduro.

#### 4.3.3 Keadaan Umum Perikanan

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan produksi perikanan tertinggi di Indonesia. Produksi perikanan mencapai 375.823,8 ton per tahun pada tahun 2015, hal ini merupakan produksi perikanan tertinggi ke dua di Indonesia menurut data BPS, 2015. Produksi perikanan yang tinggi ini didukung juga letak geografis Provinsi Jawa timur, yang hampir semua kabupaten atau kota memiliki garis pantai.

Salah satu kabupaten yang memiliki garis pantai adalah Kabupaten Tuban, dengan garis pantai sepanjang 65 km. Mulai dari Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Dengan kondisi geografis tersebut, produksi laut Kabupaten Tuban cukup melimpah, melebihi kebutuhan konsumsi ikan oleh masyarakat. Menurut peta potensi Kabupaten Tuban tahun 2013, produksi ikan oleh nelayan dari penangkapan di laut jawa dan perairan umum mencapai 10.740,07 ton per tahun. Potensi hasil laut dan pengembangan kawasan pantai

lainnya adalah budidaya rumput laut, terumbu karang dan pembibitan mangrove. Selain dari perairan laut, produksi ikan Kabupaten Tuban juga didukung dari hasil budidaya ikan dan udang diperairan darat seperti tambak, sawah tambak, kolam, keramba dan jaring apung.

Pemerintah Kabupaten Tuban juga mendukung sektor perikanan dengan membangun Plaza Ikan Tuban yang beroperasi pada tahun 2019. Fasilitas tersebut dijadikan tempat pelelangan ikan bagi nelayan, tempat penjualan ikan basah dan produk olahan perikanan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah dengan sungguh-sungguh ingin mengembangkan potensi perikanan Kabupaten Tuban.



## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Tempat Pelelangan Ikan Bulumeduro

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu berada di dalam wilayah Unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT PP) Bulu. TPI dan Pelabuhan berada dibawah naungan yang berbeda. UPT PP Bulu berada di bawah naungan Provinsi, sedangkan TPI Bulu Meduro berada di bawah naungan Kabupaten. Sehingga TPI mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatannya secara penuh ke pemerintah kabupaten dimana dijabatani oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.

Nelayan yang melaut di unit pelaksana teknis Pelabuhan Perikanan Bulu, Tuban yaitu *purse seine*, *gill net*, dogol, payang, bubu dan pancing. Rata-rata nelayan didaerah ini hanya melakukan trip *one day fishing*. Namun tidak pada setiap musim nelayan dapat melaut karena faktor cuaca yang tidak memungkinkan untuk melaut. Armada penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Bulu adalah armada penangkapan ikan skala kecil yakni penangkapan ikan yang menggunakan perahu motor, perahu motor temple atau kapal motor berukuran kurang dari 2 GT, serta menggunakan armada penangkapan skala menengah yakni penangkapan ikan yang menggunakan perahu motor, perahu motor temple atau kapal motor berukuran kurang dari 2 – 30 GT. Dengan berbagai macam alat tangkap dan ukuran kapal yang digunakan dalam proses melaut di Pelabuhan Perikanan Bulu maka hasil produksi perikanan tangkap nelayan di Pelabuhan Perikanan Bulu sangat bervariasi, berbagai jenis ukuran ikan dan juga macam-macam spesies ikan.

Pelelangan di TPI Bulu Meduro mulai di uji coba pada bulan Desember 2014 dan mulai aktif pada bulan Januari 2015 dengan menggunakan sistem

pelelangan tradisional. Kemudian setelah 3 bulan berjalan timbul konflik antara bakul, nelayan, dan pihak TPI yang mengakibatkan pelelangan tidak dapat beroperasi. Konflik timbul akibat bakul tidak melunasi pembayaran pelelangan, ketika bakul memenangkan pelelangan mereka mengambil hasil lelang kemudian membayar setengahnya dan tidak kunjung dilunasi atau menghutang pembayarannya. Karena bakul tidak membayar tagihannya pada TPI hal ini mengakibatkan TPI tidak bisa membayar nelayan atas hasil tangkapan yang telah dilelang. Pihak TPI sempat menanggulangi hal tersebut dengan membayar nelayan menggunakan dana TPI yang ada hingga menyebabkan TPI kehabisan modal. Selain itu pencatatan hutang bakul tidak tercatat dengan baik TPI tidak melakukan pencatatan dengan rapih, ada ketidak jelasan administrasi di TPI dan sistem pelelangan yang kurang teorganisir dengan baik. Permasalahan tersebut mengakibatkan nelayan protes dan tidak mau mengikuti pelelangan ikan.

Pada masa uji coba, pelelangan dilakukan dua kali dalam sehari. Pagi hari pukul 05:00 WIB – 10:00 WIB untuk hasil tangkapan pure seine, dan pukul 13:00 WIB – 17:00 WIB untuk alat tangkap payang. Namun setelah adanya konflik, lelang tidak berjalan lagi mulai bulan April, kemudian pada bulan Juli 2015 pelelangan digerakkan kembali tetapi hanya nelayan payang yang mengikuti lelang dan tidak berjalan lama. Hingga pada bulan Januari 2016 pelelangan di TPI Bulu Meduro tidak berjalan sama sekali.

Melihat kondisi TPI Bulu Meduro yang demikian pihak Dinas mengambil langkah untuk melakukan perbaikan. Pada bulan Februari 2016 dilakukan perbaikan sistem kerja, pembinaan karyawan TPI Bulu Meduro dan sosialisasi pada nelayan dan bakul, proses ini berjalan secara bertahap dan membutuhkan waktu cukup lama dimana diskusi dengan stakeholder dilakukan untuk memperoleh kesepakatan bersama, dan dari kesepakatan-kesepakatan tersebut

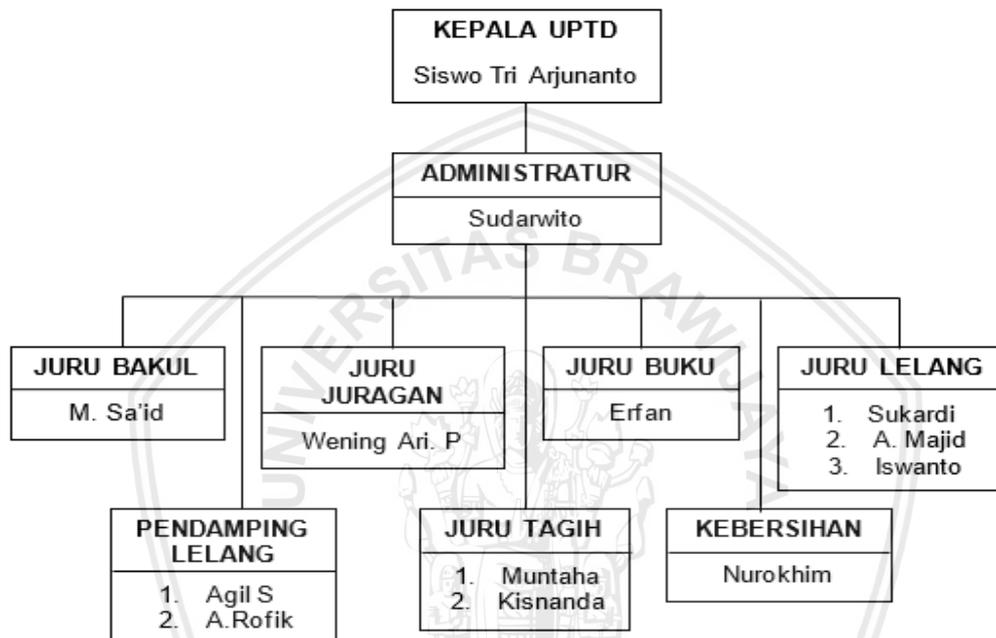
dibuatlah kebijakan. Pada bulan Agustus 2017 sistem pelelangan yang baru mulai di uji coba yang disebut sebagai sistem pelelangan terbuka atau pelelangan murni. Pada penerapan sistem pelelangan murni dilakukan perubahan pada biaya retribusi sebagai salah satu cara untuk menarik minat nelayan dan bakul agar mau mengikuti pelelangan di TPI Bulu Meduro dimana yang awalnya retribusi dikenakan pada nelayan dan bakul sebanyak 2,5 % berdasarkan Peraturan Bupati Tuban No. 59 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan maka biaya retribusi dirubah dengan jumlah sebesar 2 % Nelayan dan 1%. Dengan adanya kebijakan penurunan retribusi ini diharapkan nelayan dan bakul mau mengikuti pelelangan kembali karena hal tersebut merupakan salah satu permintaan nelayan dan bakul TPI Bulu dalam musyawarah atau diskusi yang dilakukan pihak dinas.

Pelelangan murni di TPI Bulu Meduro mulai aktif sejak bulan Agustus 2017 hingga saat ini, akan tetapi pelelangan murni sejauh ini baru diikuti oleh nelayan pure sein saja. Nelayan payang tidak mengikuti pelelangan murni karena hasil tangkapannya yang butuh penanganan cepat sedangkan pelelangan murni membutuhkan waktu lebih untuk melelang hasil tangkapan nelayan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

## **5.2 Manajemen Tempat Pelelangan Ikan**

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu Meduro memiliki pimpinan yaitu Kepala UPTD, satu wakil pimpinan yaitu Administratur dan 11 karyawan. Karyawan TPI merupakan karyawan kontrak yang sudah menetap sejak tahun 2014. Karyawan TPI Bulu Meduro merupakan masyarakat asli Bulu Komplek dan perekrutannya dilakukan secara langsung dimana masing – masing kepala desa (Bulujowo, Banjarjo, Bulumeduro dan Boncong) merekomendasikan atau mengutus beberapa penduduknya untuk menjadi karyawan di TPI Bulu Meduro dengan

memenuhi standart yang dibutuhkan sebagai karyawan TPI Bulu. Adapun yang sudah berstatus PNS di TPI hanya Kepala UPTD dan Administratur yang merupakan jabatan tertinggi di TPI sehingga memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawasi segala kegiatan yang ada di TPI Bulu Meduro. Pada Gambar 3 akan disajikan struktur organisasi TPI Bulu Meduro.



Gambar 3. Struktur Organisasi TPI Bulu Meduro Meduro (TPI Bulu Meduro, Meduro, 2018)

Struktur organisasi TPI Bulu Meduro terdiri dari 7 bidang, diantaranya juru bakul, juru juragan, juru buku, juru lelang, pendamping lelang, juru tagih dan kebersihan. Masing – masing bidang memiliki tugas pokok yang berbeda dan bertanggung jawab kepada Administratur TPI. segala kegiatan dan laporan lapang selama kegiatan pelelangan wajib dilaporkan kepada Administratur. Kemudian administratur bertanggung jawab memberi laporan kepada kepala UPTD selaku pimpinan TPI dan kemudian dari kepala UPTD akan dilaporkan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban. Untuk tugas pokok masing – masing bidang akan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Tugas Pokok Masing-masing Bidang Pada TPI Bulu Meduro

No	Bidang	Tugas
1.	Juru Bakul	Melakukan penagihan uang kepada bakul atas borongan yang telah dibeli ketika pelaksanaan lelang dan menerima pembayaran.
2.	Juru Bayar	Membayar borongan juragan yang telah dibeli oleh bakul.
3.	Juru Buku	Menampung karcis hasil lelang nelayan untuk diganti menjadi nota dan dibukukan pada buku juragan.
4.	Juru Lelang	Mengatur jalannya kegiatan lelang dan menentukan harga ikan yang dilelang.
5.	Pendamping Lelang	Membantu juru lelang pada saat pelaksanaan pelelangan.
6.	Juru Tagih	Bekerjasama dengan juru bakul untuk melakukan penagihan uang kepada bakul atas borongan yang diambil pada saat lelang.
7.	Kebersihan	Menjaga kebersihan lingkungan TPI.

Sumber:TPI Bulu Meduro Meduro, 2018

### 5.2.1 Mekanisme Pelelangan

Berdasarkan pada PP No. 54 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap hasil tangkap harus dijual melalui lelang. Lelang memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan harga jual serta memperpendek rantai pemasaran. Secara teknis pelaksanaan pelelangan memberikan keuntungan bagi nelayan, bakul, dan pemerintah daerah. Teknis pelelangan di TPI Bulu Meduro terdiri dari dua mekanisme pelelangan, yang pertama adalah lelang tertutup atau disebut sebagai lelang tradisional dan lelang terbuka atau disebut sebagai lelang murni. Terdapat perbedaan mekanisme dari kedua sistem lelang tersebut yang akan disajikan dibawah dengan bagan dan penjelasan.

#### A. Sistem Pelelangan Terbuka/ Murni

Sistem pelelangan murni dilakukan di dalam TPI (*hall* TPI) yang dipandu oleh juru lelang dengan prinsip yang terbuka/ transparan dimana kedua belah pihak (bakul dan nelayan) dapat menyaksikan jalannya proses pelelangan. Harga ditawarkan mulai dari harga terendah menurut harga pasaran yang

kemudian terus dinaikkan ke harga tertinggi hingga mendapatkan pemenangnya, yaitu bakul yang menyanggupi harga yang ditawarkan. Patokan harga terendah yang diberikan juru lelang didasarkan atas harga jual ikan yang berlaku di pasaran.

Pelaksanaan pelelangan murni dilakukan pada pagi hari pukul 05:00 WIB – 10:00 WIB. Setelah kapal bersandar dan melakukan bongkar muat, hasil tangkapan langsung dibawa ke *hall* TPI dan dipindahkan dalam keranjang sesuai jenis ikan lalu diberi nomor urut sesuai kedatangan kemudian dilelang sesuai urutan. Lelang diselenggarakan dan diatur oleh karyawan TPI. Penanggung jawabnya adalah juru lelang yang dibantu oleh pendamping lelang. Juru lelang akan memulai dari harga terendah yang akan terus naik sampai diperoleh satu orang pemenang. Pendamping lelang membantu juru lelang untuk menentukan jenis ikan dan jumlah keranjang ikan yang akan ditawarkan. Hasil lelang dicatat dalam buku bakul dan karcis lelang yang dilakukan oleh juru bakul. Karcis akan diberikan kepada pemenang dan juragan yang nantinya akan disetor ke kasir untuk proses administrasi. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* / alur roses pelelangan ikan akan disajikan pada Gambar 4 dibawah ini.



Gambar 4. Standart Operasional Prosedure(SOP) Pelelangan Ikan diTPI Bulu Meduro.  
(TPI Bulu Meduro Meduro, 2018)

Karcis lelang terdiri atas karcis juragan dan karcis bakul. Karcis juragan berwarna merah berisi harga jual tangkapannya yang ditulis oleh juru buku kemudian bisa disetorkan ke kasir juragan. Kasir juragan akan membayar sesuai dengan nominal yang tercantum pada karcis yang akan dipotong biaya retribusi 2% dan dana *saving* 1% ke juragan sebagai pendapatan hasil lelang hari itu.

Karcis bakul berwarna putih yang berfungsi sebagai tanda bukti ketika bakul akan membayar ke pihak TPI. Karcis tersebut berisi jumlah keranjang dan nominal harga lelang yang kemudian akan dicek kembali oleh kasir dengan buku bakul agar tidak terjadi kesalahan. Bakul memiliki kewajiban untuk membayar ke

TPI di kasir bakul sesuai dengan karcis ditambah dengan biaya retribusi sebesar 1% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **B. Sistem Pelelangan Tertutup/ Tradisional**

Sistem pelelangan tradisional transaksinya berlangsung diluar TPI yaitu di dekat tempat kapal mendarat atau di dermaga. Agar nelayan tidak menjual tanpa melalui perantara maka TPI tetap melakukan pendampingan dan mengenakan retribusi pada bakul maupun juragan. Proses dimulai ketika ikan didaratkan dari kapal, kemudian ditimbang dan harga langsung ditentukan atas kesepakatan bakul dengan nelayan juragan dengan pengawasan petugas dari TPI. Jika harga sudah disepakati maka akan dicatat oleh istri juragan kapal kemudian bakul akan melakukan pembayaran hasil borongan dengan tambahan uang retribusi dan nelayan juragan akan menyerahkan karcis hasil perolehan lelang ke kasir TPI untuk membayar retribusi. Yang melakukan lelang tertutup adalah nelayan kapal payang/ cantrang, karena selain jumlah ikan tangkapannya tidak sebanyak kapal *pure seine* jenis ikannya juga lebih bermacam - macam dan harus cepat ditangani agar kualitasnya tidak menurun. Bakul – bakul yang membelipun kebanyakan merupakan bakul kecil yang setelah melakukan pembelian akan langsung menjual hasil pembeliannya ke pasar terdekat dalam bentuk segar.

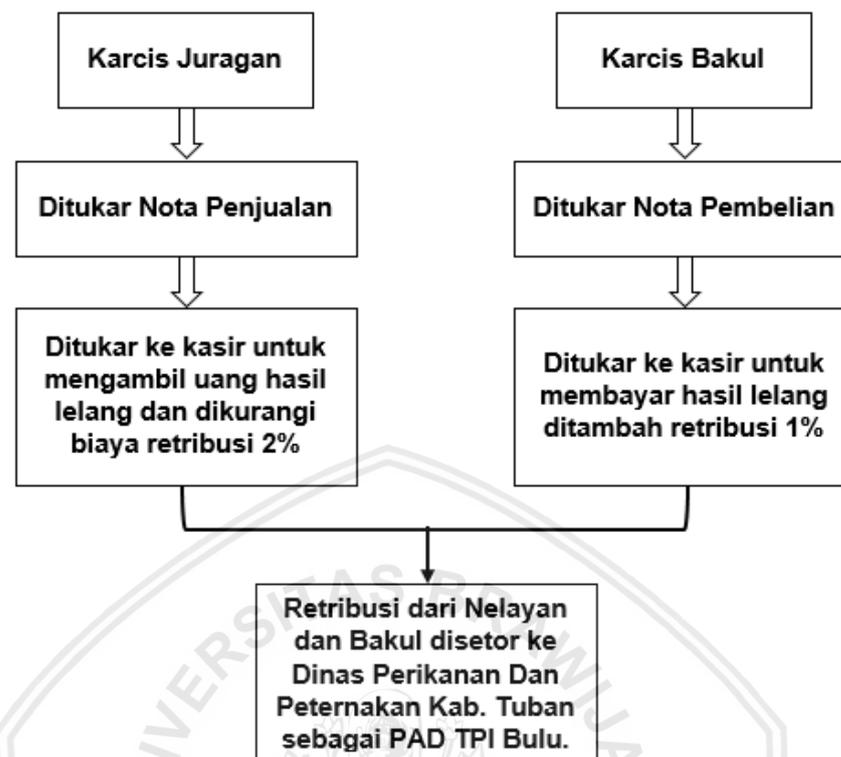
#### **5.2.2 Administrasi TPI**

Dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pelelangan ikan di TPI Bulu Meduro, bagian administrasi memiliki peran penting. Karena apabila administrasi keuangan tidak teratur dan lambat, hal ini dapat menghambat jalannya pelelangan dalam hal pembayaran uang ke nelayan dan pencatatan keuangan TPI. Untuk itu pada bagian administrasi atau pembayaran ini dibuat *Standart Operasional Prosedur* dan pembagian tugas yang jelas agar dapat dikerjakan dengan efisien.

Pengelolaan administrasi pembayaran hasil pelelangan ikan di TPI Bulu Meduro terdiri atas juru bakul (kasir bakul), juru bayar (kasir nelayan), kemudian juru buku dan juru tagih yang bertanggung jawab langsung pada administratur TPI. Bagian administrasi pembayaran ini bertugas mengkoordinir transaksi keuangan jual beli ikan hasil pelelangan serta mengelola setoran retribusi TPI sebesar 2% untuk nelayan dan 1% untuk bakul.

Pihak TPI juga menawarkan dana tabungan sebesar 1% untuk nelayan dimana uang tersebut dapat diambil ketika musim paceklik tiba. Tabungan ini bersifat tidak memaksa, maksudnya adalah apabila juragan memang ingin menabung maka TPI akan menerima uang tersebut dan diberikan buku tabungan apabila tidak, pihak TPI tidak memaksa mereka untuk menabung. Karena diadakannya tabungan ini bertujuan untuk mengantisipasi ketika musim paceklik tiba apabila nelayan tidak dapat melaut karena musim maka tabungan mereka bisa diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari selama tidak ada pemauskan karena tidak bisa melaut.

Administrasi pembayaran pelelangan dimulai dari penukaran karcis kepada juru buku yang kemudian karcis tersebut akan dibukukan di buku nelayan/ juragan dan ditukar dengan nota penjualan untuk juragan dan nota pembelian untuk bakul, kemudian nota tersebut akan ditukar di kasir. Kasir dibagi menjadi dua yaitu kasir bakul dan kasir juragan. Kasir bakul menerima uang pembayaran dari bakul sebesar harga ikan yang telah dilelang ditambah dengan biaya retribusi sebesar 1% kemudian dicatat dan diserahkan kepada kasir juragan. Kasir juragan akan membayar uang hasil lelang pada juragan dengan dipotong biaya retribusi sebesar 2% dari hasil pelelangan yang kemudian dicatat di pembukuan. Berikut akan disajikan *Standart Operasional Prosedur Pembayaran TPI Bulu Meduro Tuban* pada Gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5. Standart Operasional Prosedure (SOP) Pembayaran Lelang (TPI Bulu Meduro Meduro, 2018)

Pembukuan pelelangan setiap harinya akan dilaporkan dan diserahkan pada administratur, kemudian setiap dua minggu sekali administratur akan menyerahkan uang tersebut kepada bendahara Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban. Berikut hasil wawancara mendalam dengan Kepala UPTD tentang pelaporan administrasi

*"Administrasi itu pembukuannya yang membuat administratur, kemudian dua minggu sekali atau satu bulan sekali diserahkan kepada Dinas oleh administratur TPI. seerti itu mbak."* (W2/STA/Info16)

Menurut Kepala UPTD laporan pelelangan akan diserahkan ke dinas setiap dua minggu atau satu bulan sekali, akan tetapi temuan di lapang menunjukkan bahwa pelaporan tidak selalu dilakukan secara tertib 2 minggu sekali, terkadang pelaporan dilakukan satu atau dua bulan sekali ke pihak Dinas.

### 5.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan dua hal penting dalam sebuah usaha. Menurut kamus besar bahasa Indonesia sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek), sedangkan prasarana merupakan hal yang bersifat menunjang jalannya suatu proses. Semua sarana dan prasarana di TPI, kecuali peralatan kantor TPI dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Bulu Bancar. Berikut merupakan daftar sarana dan prasarana yang ada di TPI Bulu Meduro yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Sarana TPI Bulu Meduro

No	Nama	Jumlah
1.	Keranjang (basket)	1000
2.	Sound sistem	1
3.	Laptop	1
4.	Almari	1
5.	Meja kursi kerja	6
6.	Peralatan administrasi	
7.	Kendaraan roda 2	3

Sumber: Data Diolah (2018)

TPI memiliki keranjang/ basket untuk mengangkut ikan sejumlah 1000 buah dengan kondisi yang baik, keranjang tersebut adalah pemberian dari dinas untuk memfasilitasi TPI yang dikelola oleh Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana (POKLASAR). Penggunaannya dikenakan biaya RP.1000 rupiah untuk biaya perawatannya. Selain itu sarana yang lainnya seperti sound sistem untuk kegiatan pelelangan, laptop untuk keperluan pendataan administratur, lemari dan sebagainya dalam kondisi baik. Adapun Prasarana yang terdapat di TPI Bulu Meduro Kabupaten Tuban dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 8. Prasarana TPI Bulu Meduro

No	Nama	Jumlah	Ukuran
1.	Lahan peabuhan	1	5,6 Ha
2.	Dermaga	1	150 m
3.	Jalan komplek	1	
4.	Drainase	1	
5.	Lampu jalan pelabuhan	25	
6.	Kolam pelabuhan	1	3 Ha
7.	Breakwater	1	500 m
8.	Gedung TPI	1	900 m2
9.	Instalasi air bersih	2	
10.	Tangki air	1	9000 m2
11.	Daya listrik	1	33.000 watt
12.	Los jaring	1	

Sumber: Data Diolah (2018)

Kondisi jalan raya dari dan ke pelabuhan berkondisi baik dan terbuat dari plester semen. sedangkan jalanan komplek terbuat dari *paving block*. Dermaga di Pelabuhan Perikanan Bulu dalam kondisi yang baik dan berfungsi, dermaga berada dibawah tanggung jawab UPT Pusat dibawah pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Daya dukung dermaga masih belum optimal dimana masih dapat menampung kapal/perahu penangkap ikan yang ada. UPT Pelabuhan Perikanan Bulu memiliki kolam labuh pelabuhan dan dapat menampung 100-300 unit kapal/perahu penangkap ikan yang ukurannya antara kurang dari 2 sampai 30 GT. Dalam kebijakan pemerintah setiap nelayan yang melabuhkan kapal atau perahunya di dermaga Pelabuhan Perikanan Bulu ini ditarik biaya sebesar Rp. 500,00 per kapal setiap harinya. Sumber air bersih yang digunakan untuk kebersihan bersumber dari air sumur bor (air tanah) sedangkan air bersih yang digunakan untuk konsumsi dan perbekalan

penangkapan ikan berasal dari sumber bor dan air isi ulang. Bangunan TPI yang ada di Pelabuhan Perikanan Bulu ini dalam kondisi baik.

#### **5.4 Analisis Fungsi Manajemen TPI Bulu Meduro Meduro**

Peran Manajemen Tempat Pelelangan Ikan Terhadap Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu Meduro, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peneliti menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen menurut G.R Terry. Dimana dalam teori ini memberikan gambaran dan tolak ukur atas komponen-komponen penting yang harus menjadi pertimbangan dalam mengatur manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diantaranya mencakup *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.

##### **5.4.1 Planning (Perencanaan)**

*Planning* (Perencanaan) merupakan langkah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan, hal ini mencakup pengambilan keputusan karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Memerlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa depan (Terry, 2008).

Manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu Meduro memiliki perencanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas. Rencana yang dibuat oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban adalah menyiapkan sumber daya manusia, menata sistem pelelangan, dan melengkapi sarana dan prasaran agar pengembangan perikanan tangkap dapat berjalan dengan baik khususnya untuk produksi dan pemasaran ikan melalui pelelangan. Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala Dinas ketika di wawancarai tentang program yang dibuat untuk TPI. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.

*"Jadi gini, TPI itu sebagai kata kunci di dalam konsep pengembangan perikanan tangkap khususnya untuk memastikan produksi dan pemasaran dari ikan yang ditangkap nelayan bisa berjalan dengan baik. Untuk menunjang hal itu program yang dibuat dinas diantaranya meningkatkan pengelolaan dari aspek manajemen khususnya peningkatan SDM diantaranya melalui pelatihan keterampilan singkat, fokus group diskusi tentang persoalan yang dihadapi sehari-hari, dan upaya peningkatan kesejahteraan. Yang kedua dilakukan penataan sistem pelelangan yang disepakati bersama antara pihak nelayan maupun bakul dan pemilik kapal. Karena pelelangan tidak bisa berdiri sendiri, dia harus melibatkan stakeholder di lapangan. Berikutnya kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di TPI diantaranya basket, glendong, dan yang lainnya yang menunjang pelaksanaan pelelangan berjalan dengan baik."* (W1/AMN/Info1)

Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban memiliki tujuan untuk mengembangkan perikanan tangkap khususnya memastikan produksi dan pemasaran ikan dengan menciptakan pelelangan yang dapat membantu pemasaran hasil tangkapan nelayan. Sehingga Dinas Perikanan dan Peternakan membuat beberapa program untuk meningkatkan pengelolaan di TPI yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan aspek manajemen khususnya Sumber Daya Manusia (SDM).  
Hsl ini dilakukan melalui pelatihan keterampilan singkat dimana aryawan TPI diberikan pengarahan dan pelatihan singkat terkait tugas yang akan dilaksanakan. Focus group diskusi terkait persoalan yang terjadi di lapangan sehari – hari. Diskusi dilakukan ketika ada permasalahan terjadi di lapangan yang dilakukan setelah evaluasi.
- 2) Penataan sistem pelelangan yang disepakati bersama *stakeholder* dalam hal ini adalah nelayan, bakul, dan pemilik kapal. Dilakukan sosialisasi dan diskusi dengan *stakeholder* sebelum pelelangan dijalankan untuk memperoleh kesepakatan bersama sehingga pelelangan dapat berjalan, karena pada dasarnya pelelangan tidak dapat terlepas dari peran stakeholder tersebut.
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana di TPI. Dinas Perikanan dan Peternakan menyediakan sarana dan prasarana dengan bekerjasama dengan pihak

pelabuhan selaku yang memiliki wewenang atas pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan.

Perencanaan yang telah dibuat oleh dinas kemudian diimplementasikan di lapang oleh Kepala UPTD yang dibantu oleh Administratur selaku pelaksana teknis TPI. Peraturan teknis di lapang diatur sebagaimana yang tertulis pada ketetapan Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, semua bentuk pengaturan teknis diatur dengan pedoman Peraturan Bupati tersebut. TPI Bulu Meduro telah memiliki *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang jelas sehingga produksi dan pemasaran dijalankan sesuai dengan SOP tersebut. Akan tetapi meskipun pelelangan sudah berjalan setiap harinya selama musim ikan berlangsung, masih ada beberapa kendala dan persoalan di lapang yang perlu diselesaikan seperti kapal payang yang belum mengikuti pelelangan di TPI karena faktor tertentu dan ketidak tertiban bakul dalam keikutsertaan pada pelelangan maupun pembayaran hasil borongan pelelangan.

Persoalan kapal payang yang tidak mengikuti pelelangan tidak dibiarkan oleh pihak TPI, ketika pihak TPI diwawancarai terkait permasalahan tersebut dan solusi yang selama ini dilakukan untuk menanganinya adimistratur memberikan penjelasan bahwa TPI selalu mengusahakan untuk semua kapal dapat mengikuti plelangan, dan berikut adalah hasil wawancara dengan administratur TPI tentang solusi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

*“Yang jelas kita tetap usahakan nanti payang itu juga ikut lelang menyusul seperti pure sein tapi gini mbak hasil tangkap payang kan sedikit, dan jenisnya ikannya itu banyak dan itu adalah ikan pasar maksudnya ikannya itu biasa dijual di pasar bakulnya juga kecil-kecil bukan bakul besar, ini gak bisa dipaksa mbak jadi ini susah. Ikan - ikan payang ini butuh di tangani cepat, karena rawan rusak, kalau sudah rusak harganya anjlok jadi ya susah kalau disuruh ikut lelang itu.”* (W3/SDT/Info6).

Kapal payangan tidak mengikuti pelelangan di TPI karena beberapa faktor, diantaranya karena hasil tangkapan kapal payang yang tidak banyak, jenis ikan

yang beragam, dan membutuhkan penanganan yang cepat karena mudah rusak selain itu kebanyakan bakul-bakul yang membeli hasil payangan adalah bakul kecil yang biasa menjual dagangannya di pasar. Jika mengikuti pelelangan, ikan butuh waktu untuk terjual karena harus mengantri untuk dilelang dan hal tersebut menjadi resiko bagi nelayan dimana akan berdampak pada kualitas ikan yang akan menurun dan terjadi penurunan harga, sehingga nelayan payang melakukan penjualan langsung di dermaga, dimana setelah kapal bersandar ikan langsung ditimbang dan dijual ke bakul yang sudah menunggu untuk membeli. TPI menindaklanjuti permasalahan diatas dengan memberlakukan alternatif pelelangan yang biasa disebut dengan pelelangan *indoor* dimana ikan bisa langsung dijual di dermaga setelah kapal bersandar akan tetapi tetap dikenakan retribusi pelelangan sesuai yang ditetapkan. Cara tersebut dilakukan sebagai bentuk langkah awal pembelajaran bagi nelayan dan bakul agar mau mengikuti pelelangan di TPI.

Dua sistem pelelangan di TPI Bulu Meduro yang diberlakukan masih menyisakan persoalan, karena kenyataan dilapang masih didapati nelayan yang melakukan penjualan diluar TPI meskipun Tpi sudah melakukan himbauan untuk melakukan pemasaran hasil tangkapan melalui pelelangan. Hal tersebut menjadi catatan penting bagi TPI Bulu Meduro karena pemasaran yang tidak melalui pelelangan dapat memberikan resiko seperti permainan harga yang dilakukan bakul. Beberapa nelayan mengaku masih ada penjualan yang dilakukan dilur TPI meskipun mereka menyadari pelelangan lebih menguntungkan. Berikut adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan nelayan buruh tentang pelelangan di TPI Bulu Meduro.

*"Jujur ya senang, tpi karen kita ini ikut orang meskipun senang ikut lelang tapi kalau juragannya bilang jual ke tengkulak ya bisa apa, gak bisa apa – apa kecuali ngiyain. Ya mau gimana wong juragan itu juga punya ikatan sama tengkulak rata – rata. Mereka ada hutang sama tengkulak itu jadi jualnya kadang harus kesitu." (W6/MRT/Info13)*

Adanya keterikatan menjadi salah satu alasan mengapa nelayan tidak mengikuti pelelangan, atau terkadang tidak semua hasil tangkapan diikuti pelelangan sebagian dijual ke bakul dan sebagian dijual melalui pelelangan. Persoalan lain yang menjadi faktor adalah ketertiban pembayaran bakul atas borongan yang dilakukan. Pembayaran dilunasi secara bertahap dalam waktu 2 – 3 hari setelahnya atau disebut “Nyaur-ngamek” sehingga TPI terpaksa melakukan pembayaran pada nelayan secara bertahap. Jika ditinjau dari peraturan yang ada pada Peraturan Bupati, bakul harus melunasi hasil pembeliannya pada lelang. Sebagaimana yang tertulis pada Peraturan Bupati Tuban No. 52 Tahun 2014 pada pasal 9 bahwa bakul memiliki kewajiban:

- 1) Menyerahkan uang dan/atau inden sebelum dilaksanakan proses lelang ikan;
- 2) Melengkapi administrasi yang ditentukan; dan
- 3) Membayar lunas dan tunai terhadap hasil lelang ikan yang dimenangkan.

Peraturan terkait pembayaran pelelangan juga diperjelas pada pasal 12 Peraturan Bupati Tuban No. 52 Tahun 2014, yang berbunyi:

- 1) Pemenang Lelang dengan nilai tawar tertinggi harus membayar secara tunai sesuai dengan harga lelang pada saat itu.
- 2) Apabila pemenang lelang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak membayar tunai maka tidak diperbolehkan mengikuti lelang berikutnya, kecuali yang bersangkutan telah melunasi pembayaran lelang yang menjadi kewajibannya.

Peraturan Bupati tersebut adalah peraturan sekaligus menjadi landasan pelaksanaan pelelangan akan tetapi realita yang ada di lapangan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan, seperti penyerahan uang sebelum mengikuti lelang dan pelunasan secara langsung setelah pelelangan

selesai yang harus dilakukan bakul sebelum mengikuti pelelangan. Seharusnya sebelum mengikuti pelelangan bakul wajib menyerahkan uang kepada TPI terlebih dahulu dan dilakukan secara inden, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Berkaitan dengan hal ini TPI telah melakukan usaha untuk menertibkan permasalahan tersebut akan tetapi belum sepenuhnya bisa diatasi bahkan masih ada bakul yang tidak mengikuti pelelangan atau membeli langsung pada nelayan tanpa melalui TPI. Sehingga untuk menertibkan bakul yang tidak mengikuti pelelangan TPI bekerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban dan penyitaan timbangan, dengan tindakan ini diharapkan bakul yang tidak mematuhi aturan dapat jera dan mengikuti pelelangan sepenuhnya. Sedangkan untuk pembayaran yang menunggak dilakukan penagihan oleh juru tagih maksimal 2 atau 3 hari harus sudah dilunasi, jika tidak maka tidak boleh mengikuti pelelangan berikutnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **5.4.2 Organizing (Pengorganisasian)**

*Organizing* mencakup pembagian komponen - komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok – kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit – unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit – unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *Organizing*. Ada yang memiliki pendapat berbeda, dan memasukan *staffing* sebagai fungsi utama. Didalam setiap kejadian, pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan bersama (Terry, 2008).

Pengorganisasian merupakan salah satu tahap paling penting dalam manajemen TPI, pengorganisasian salah satunya adalah memberi pengarahan

pada yang bertanggung jawab menjalankan kewajiban dari atasan ke bawahan. Kepala UPTD memberikan penjelasan terkait bagaimana jalannya pengarahan yang dilakukan. Berikut adalah hasil wawancara mendalam dengan Kepala UPTD tentang proses pembinaan di TPI Bulu Meduro.

*“Kalau saya biasanya tiap bulan itu ada rapat di dinas nah itu dikasih pengarahan mbak untuk pengelolaan TPI di Tuban terus ngasi arahan ke administratur. Kalau pembinaan untuk karyawan disini itu sifatnya insidental, jika ada permasalahan maka kita adakan evaluasi dan dilakukan pembinaan. Karena kalau di TPI sendiri kan sudah diawasi setiap harinya oleh administratur, jadi administratur itu mengetahui karyawan ini kerjanya bagaimana, seperti apa, itu sudah tanggung jawabnya atau kadang sesekali saya evaluasi juga kalau ada masalah kayak tadi.” (W2/STA/Info11)*

Pengarahan yang ada di TPI sudah cukup baik, pengarahan dari Dinas Perikanan dan Peternakan dilakukan secara berkelanjutan setiap rapat dinas. Pengarahan dari Dinas Perikanan diberikan kepada Kepala UPTD selaku yang memiliki tanggung jawab memimpin TPI. Kemudian dari Kepala UPTD akan memberi pengarahan kepada administratur dan kepada karyawan.

Struktur organisasi di TPI berbrntuk lini, komando berada pada satu pimpinan yaitu Kepala UPTD. Hubungan pimpinan dengan stafnya bersifat langsung sehingga kepala UPTD selain memberikan pengarahan melalui administratur juga dapat memberikan pengarahan terhadap karyawan yang lain secara langsung. Pembentukan organisasi didasarkan pada tujuan yang ditetapkan dinas dan mengacu pada Peraturan Bupati dimana garis – garis pengawasan dan penentuan tanggung jawab didasari atas peraturan tersebut.

Bentuk pengorganisasian selanjutnya adalah menyiapkan komponen – komponen yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pelelangan. Komponen tersebut adalah bangunan tempat pelelangan, sarana dan prasarana, serta yang paling utama adalah sumber daya manusia atau pegawai TPI. Pegawai TPI terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai kontrak. Kepala UPTD dan administratur adalah PNS yang penempatannya sudah terikat dengan tugas

dinas, sedangkan juru lelang, juru tagih, juru buku dan karyawan lainnya adalah pegawai kontrak yang direkrut dari desa – desa yang ditunjuk atau yang direkomendasikan oleh Kepala Desa, hal ini dilakukan sebagai bentuk kerja sama dengan desa di daerah Bulu untuk memberdayakan masyarakat setempat yang memiliki kompetensi pada bidang yang dibutuhkan dengan membuka peluang kerja. Perekrutan dilakukan dengan pertimbangan kesesuaian kemampuan tiap individu dengan tugas yang akan diberikan, kemudian karyawan diberikan pengarahan serta pelatihan singkat agar dapat benar – benar memahami tugas pokok dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Kinerja karyawan akan dipertimbangkan dalam jangka satu tahun apabila kinerjanya bagus kontrak akan diperpanjang dan apabila kinerjanya tidak baik maka akan diganti.

#### **5.4.3 Actuating (Penggerakan)**

*Actuating*, atau disebut juga gerakan aksi yang mencakup kegiatan yang dilakukan untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka (Terry, 2008).

Dalam pelaksanaan teknis pelelangan ikan TPI Bulu Meduro dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang merupakan pegawai negeri sipil, dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban. Tugas dari Kepala UPTD telah diatur dalam Peraturan Bupati No.52 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan pada bab 3 pasal 5 ayat 4 yang menyatakan bahwa Kepala UPTD bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan di masing – masing TPI dan kegiatan lain di lingkungan TPI meliputi:

- 1) Penimbangan dan pelelangan ikan;
- 2) Kelancaran pungutan dan penyetoran hasil pungutan lelang
- 3) Pengamatan TPI
- 4) Pengaturan bongkar muat ikan
- 5) Penyelenggaraan administrasi lelang
- 6) Bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan
- 7) Pembuatan laporan mingguan dan bulanan

Dalam pelaksanaan tugas – tugas tersebut Kepala UPTD dibantu oleh administrator TPI, dimana tugas administrator juga telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 52 tahun 2014 pasal 6 ayat 2 bahwa administrator mempunyai tugas:

- 1) Memimpin pelaksanaan lelang ikan di TPI sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 2) Melaksanakan pungutan dan penyetoran hasil pungutan lelang; dan
- 3) Membuat laporan mingguan dan bulanan.

Kepala UPTD dan administrator TPI Bulu Meduro melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP). Hampir setiap pagi Kepala UPTD melakukan pengawasan di TPI Bulu untuk memastikan aktivitas pelelangan dan kegiatan – kegiatan di TPI berjalan dengan baik. Selain itu sesekali dilakukan pengarahan dalam kinerja karyawan TPI terkait tugas serta pemberian motivasi agar karyawan memiliki semangat kerja serta pemberian *reward* bagi karyawan yang bekerja dengan giat. Kemudian untuk mengantisipasi penunggakan bakul yang berkepanjangan TPI memberi batas pelunasan maksimal 3 hari, dan juru tagih bertugas melakukan penagihan. Apabila bakul tidak melakukan pelunasan pada waktu yang telah ditentukan maka tidak boleh mengikuti pelelangan selanjutnya sebagai bentuk sanksi agar bakul tidak melanggar ketentuan.

#### 5.4.4 *Controlling* (Pengawasan)

*Controlling* merupakan usaha untuk meneliti kegiatan yang ada dan akan dilaksanakan. Pengendalian berorientasi kepada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang – orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai. *Controlling* mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan di evaluasi dan penyimpangan – penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki agar tujuan – tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada banyak cara untuk melakukan perbaikan, termasuk merubah rencana bahkan tujuan, mengatur kembali tugas dan wewenang, tetapi perubahan seluruhnya dilakukan melalui manusianya. Orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan itu harus dicari dan mengambil langkah – langkah perbaikan terhadap hal – hal yang sudah berjalan atau yang akan dilaksanakan (Terry, 2008).

Kontroling dalam sebuah pekerjaan penting dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan di TPI Bulu Meduro yang melakukan kontroling adalah Kepala UPTD dan Administratur. Berikut adalah hasil wawancara mendalam dengan administratur TPI Bulu Meduro tentang pengawasan yang dilakukan di TPI Bulu Meduro.

*“Ya kalau pengawasan soal karyawan disini, kerjanya, teknis-teknis dan apa saja yang berjalan di TPI ini secara langsung saya dan Pak Sis kan setiap hari disini untuk mengawasi semuanya. Memantau pekerjaan karyawan kalau ada yang gak pas selesai kegiatan kita langsung evaluasi biar besok tidak ada salah lagi. Terus nanti kalau memang ada masalah yang rumit ya langsung dilaporkan ke atas mbak” (W3/SDT/Info14).*

Kepala UPTD dan administratur melakukan langkah klarifikasi dan koreksi apabila terdapat penyimpangan dalam jalannya kegiatan pelelangan yang ditemukan, kemudian mengambil alternatif solusi dengan melakukan evaluasi bersama setelah kegiatan selesai dengan mengumpulkan semua staff yang ada. Pembahasan bersama dilakukan agar semua karyawan memahami kesalahan

yang dilakukan apabila terjadi, kemudian melakukan koreksi dan pembenahan sehingga kesalahan tidak terulang di kemudian hari.

Evaluasi dilakukan apabila terjadi kesalahan yang dilakukan selama jalannya kegiatan pelelangan saja, kemudian apabila terdapat permasalahan yang krusial dan tidak dapat diselesaikan dengan langkah tersebut maka akan dilaporkan ke pihak Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban. Selain perihal kinerja teknis lapang, dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan TPI juga melakukan pembuatan laporan mingguan dan bulanan yang kemudian akan diserahkan pada Dinas setiap bulannya. Akan tetapi laporan pelelangan tersebut tidak rutin dilakukan apa lagi ketika menjelang musim angin atau paceklik tiba. Ketika musim ikan TPI aktif membuat laporan tapi tidak disetorkan ke Dinas setiap dua minggu sekali, kadang laporan tersebut baru disetorkan satu sampai dua bulan.

### **5.5 Hubungan sosial Nelayan, Bakul dan TPI Bulu Meduro**

Pengamata dan hasil wawancara di lapang menunjukkan bahwa sempat tidak berjalannya aktifitas lelang dan penunggakan pembayaran yang dilakukan bakul di TPI Bulu Meduro termasuk isu permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan pelelangan bukan hanya kepentingan kelompok melainkan kepentingan banyak pihak yang harus didukung oleh semua unsur dan peran serta masyarakat sebagai pelaku pelelangan. Daerah pesisir dengan setiap karakteristik wilayah topografi yang berbeda memiliki ciri dan karakteristik sosial budaya masyarakat perikanan yang berbeda pula sehingga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat perikanan setempat atas persepsinya mengenai pelelangan dan pentingnya pelelangan.

Hampir semua pelabuhan perikanan maupun pangkalan ikan selalu memiliki fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI). Hal ini dapat diartikan bahwa nelayan harus menjual hasil tangkapannya melalui sistem pelelangan. Nelayan

Bulu Meduro umumnya mengetahui adanya pelelangan di TPI Bulu Meduro, pelelangan TPI Bulu yang sempat tidak beroperasi karena persoalan internal TPI dan penunggakan pembayaran hasil borongan oleh bakul hingga tidak dilunasi dan merugikan nelayan telah diperbaiki dengan melakukan pembenahan pada manajemen TPI dan sistem yang berlaku, sehingga TPI dapat beroperasi hingga sekarang. Akan tetapi TPI belum mampu menjalankan peraturan terkait pembayaran bakul atas hasil lelang yang seharusnya inden menaruh uang di TPI sebelum mengikuti pelelangan, penunggakan pembayaran borongan masih terjadi hingga sekarang, hanya bedanya hutang yang dilakukan bakul tercatat dengan jelas dan harus dilunasi dalam tempo 3 hari sejak pengambilan hasil borongan atau biasa disebut dengan "Nyaur - Ngamek". Penunggakan para bakul peserta lelang tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan proses lelang. Akibat adanya tunggakan menimbulkan keengganan para nelayan untuk mengikuti pelelangan di TPI Bulu karena hasil penjualan tangkapannya tidak dapat dilunasi dengan segera, sedangkan TPI tidak memiliki modal untuk dijadikan dana talangan guna membayar hasil penjualan nelayan.

Dampak persoalan tunggakan pembayaran mengakibatkan nelayan tidak sepenuhnya menjual hasil tangkapannya melalui pelelangan. Beberapa nelayan mengaku tidak selalu menjual hasil tangkapannya melalui pelelangan, terkadang mereka menjual separuh hasilnya langsung ke bakul dan separuhnya lagi melalui lelang bahkan beberapa ada yang melakukan penjualan tanpa mengikuti pelelangan sama sekali. Salah satu penyebab hal tersebut adalah multifungsi profesi sehingga menyulitkan peran seseorang dalam sistem pelelangan. Beberapa orang yang berprofesi sebagai pengusaha pemilik kapal juga merangkap sebagai bakul. Kebiasaan lain pada masyarakat Bulu Meduro yang sulit dirubah adalah sistem langgan atau patron clien yang sudah mendarah

daging. Sistem langgan terjadi ketika nelayan tidak memiliki modal untuk melaut, keadaan ini memaksa nelayan untuk meminjam uang kepada para bakul. Bentuk timbal baliknya, nelayan harus menjual ikan hasil tangkapannya kepada bakul tersebut, yang menyebabkan bakul/ tengkulak menekan harga ikan yang dibeli dari nelayan dengan harga yang lebih rendah. Nelayan hanya berperan sebagai penerima harga (*price taker*) karena posisi tawar yang lemah sehingga hal tersebut dapat berdampak pada penurunan pendapatan nelayan. Sistem yang berlaku dalam kelembagaan tengkulak adalah kesepakatan antara nelayan dan tengkulak tersebut. Harga ikan yang dibeli oleh tengkulak dari nelayan akan lebih rendah dari harga jual melalui lelang, akan tetapi banyak nelayan yang masih memilih melakukan penjualan tanpa lelang dikarenakan kebutuhan modal dan pembayaran yang langsung dilunasi tanpa penunggakan.

Modal menjadi faktor utama mengapa nelayan masih banyak melakukan penjualan hasil tangkapan tanpa pelelangan, hal ini harus menjadi perhatian bagi TPI dan instansi terkait utamanya pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap TPI Bulu Meduro. TPI harus hadir secara lengkap selain sebagai fasilitas pemasaran, TPI seharusnya bisa hadir sebagai penyedia modal bagi nelayan agar jerat sosial yang membuat nelayan tidak bisa lepas dari ikatan dengan tengkulak/ bakul dan terpaksa memilih melakukan penjualan tanpa lelang dapat dientaskan. Pemerintah harus meningkatkan permodalan TPI sehingga hal tersebut dapat terlaksana, jika TPI mampu hadir sebagai penyedia modal bagi nelayan maka jerat sosial dapat ditekan dan nelayan bisa sepenuhnya mengikuti pelelangan karena memiliki ikatan yang lebih kuat dengan TPI.

## 5.6 Analisis Peran Manajemen TPI

Analisis peran manajemen TPI sangatlah kompleks, dilihat dari peranan yang terjadi dalam manajemen operasional TPI maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Penanggung jawab dan pengendalian

Pengelolaan TPI secara luas melibatkan Dinas Perikanan dan Peternakan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelelangan ikan, kemudian UPTD sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan kegiatan penunjang lainnya, dan Pelabuhan Perikanan selaku pemilik fasilitas tempat pelelangan, serta Kelompok Sarana dan Prasarana (POKLASAR) selaku pengelola sarana TPI (kecuali sarana administrasi). Keterlibatan beberapa lembaga tersebut berkaitan dengan tujuan didirikannya TPI yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjadi fasilitas pemasaran hasil tangkapan sehingga tercipta jual beli yang sehat.

Pengelolaan dalam tubuh TPI sendiri merupakan wewenang dan tanggung jawab kepala TPI dan karyawannya, meskipun demikian dalam menjalankan tugasnya petugas TPI tidak terlepas dari koordinasi dengan instansi terkait lainnya terutama dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban. Struktur organisasi dan pembagian tugas (*job description*) karyawan TPI mengacu pada Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2014.

Dilihat dari arus wewenang dan tanggung jawabnya, struktur organisasi TPI Bulu Meduro berbentuk garis/ lini. Hal ini menunjukkan perintah atau komando berada dalam satu pimpinan. Pelimpahan wewenang secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan terhadap bawahannya. Hubungan antara pimpinan dengan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Selain kepala UPTD sebagai top manajer, administrator sebagai manajer dibawahnya yang membantu sebagai pelaksana, atasan dan bawahan

dihubungkan dengan satu garis komando. Bentuk organisasi ini tidak rumit, akan tetapi memiliki resiko dimana rawan terjadi miss komunikasi karena karyawan dapat melakuka pelaporan langsung kepada manajer tingkat 1 tanpa melalui manajer tingkat 2.

2) Pelaksanaan efektivitas POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*)

Berdasarkan teori manajemen yang dibagi menjadi empat fungsi diantaranya *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang diterapkan pada Tempat Pelelangan Ikan Bulu yakni menetapkan tujuan dari TPI dengan memperbaiki manajemen TPI sehingga menjadikan pelelangan berjalan dengan baik agar pemasaran ikan khususnya untuk nelayan dapat berjalan dengan lancar yang menciptakan kesejahteraan nelayan.

Struktur pengorganisasian yang dipakai di TPI Bulu Meduro adalah struktur organisasi lini karena cukup sederhana dengan ditetapkannya dasar – dasar pokok dalam pengorganisasian yang memperhatikan tujuan didirikannya TPI, penentuan peraturan yang jelas sehingga pengawasan terarah, penentuan tanggung jawab yang dilakukan sesuai kemampuan dan ketetapan yang ada untuk masing – masing individu sehingga penerapan fungsi manajemen dapat lebih efektif.

Dalam pelaksanaan teknis pelelangan ikan. TPI dipimpin oleh Kepala UPTD yang dibantu oleh administratur. Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban. Masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh TPI dalam pelaksanaan pelelangan, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk menentukan langkah yang tepat mengatasi persoalan di TPI yang belun dapat diselesaikan. Penertiban peserta lelang dan bakul yang masih belum bisa sepenuhnya mengikuti pelelangan ikan dan pembayaran uang

borongan yang masih sering tidak langsung dilunasi. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga sudah seharusnya TPI melakukan tindakan lebih lanjut demi terlaksanannya pelelangan sesuai peraturan yang ditetapkan.

Kepala UPTD melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan aktifitas pelelangan ikan di TPI. dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan. Eberhasilan pencapaian, selain melakukan pengawasan lapang sebagai bentuk antisipasi penyimpangan yang terjadi maupun kesalahan teknis, Kepala UPTD melakukan evaluasi secara insidental apabila ditemui masalah yang terjadi pada pelaksanaan pelelangan, disamping itu Kepala UPTD juga membuat laporan pelelangan bulanan yang dibantu oleh administratur dan diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban.

### 3) Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam sebuah organisasi, pegawai yang kompeten dan produktif akan menentukan kelancaran kinerja. Dalam hal ini perekrutan untuk mengisi posisi yang tersedia harus dilakukan dengan baik dengan memilih orang yang tepat, utamanya memiliki kecakapan yang dibutuhkan dalam bidangnya. Dalam perekrutan karyawan TPI kewenangan dimiliki oleh Kepala UPTD. Kepala UPTD merekrut karyawan dari desa – desa di daerah Bulu Meduro dengan bekerjasama dengan Kepala Desa setempat. Hal ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat asli daerah dengan membuka peluang kerja. Pemilihan karyawan sendiri dilakukan dengan pertimbangan kemampuan yang bersangkutan terhadap posisi yang akan diisi. Pengarahan dan pembinaan terkait tugas pekerjaan diberikan setelah perekrutan sehingga karyawan memahami tanggung jawab sesuai bidangnya.

### 4) Pencapaian tujuan

Tujuan dari adanya Tempat Pelelangan Ikan adalah mengembangkan perikanan tangkap dengan memastikan produksi dan pemasaran ikan sehingga menciptakan pelelangan yang dapat membantu pemasaran hasil tangkapan nelayan dan agar tidak ada permainan harga. Target utamanya adalah berjalan baiknya pelelangan di TPI Bulu Meduro sehingga TPI menjadi sarana bagi nelayan untuk memasarkan hasil tangkapannya sehingga harga ikan dapat dikontrol dan tidak ada permainan harga yang merugikan nelayan. Penemuan di lapang membuktikan bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi di TPI yang mengakibatkan target belum dapat dipenuhi dengan maksimal, karena masih ada pelanggaran yang dilakukan bakul dalam pembayaran, masih ada kapal yang belum masuk pelelangan, dan masih ada bakul dan nelayan yang melakukan penjualan tanpa melalui TPI.

Berikut tabel pencapaian TPI setelah diadakan perbaikan manajemen oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban :

Tabel 9. Pencapaian TPI Bulu Meduro Setelah Diadakan Perbaikan

No	Kriteria	Sebelum Perbaikan Manajemen	Sesudah Perbaikan Manajemen
1.	Planning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada standart operasional prosedur yang spesifik</li> <li>• Pelelangan tidak memiliki prosedur yang jelas</li> <li>• Biaya retribusi masih tinggi yaitu sebesar 2,5 % bagi nelayan dan bakul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada standart operasional prosedur pelelangan yang spesifik</li> <li>• Pelelangan berjalan setiap hari pada musim ikan</li> <li>• Adanya penurunan retribusi dengan ketentuan 2 % nelayan dan 1 % bakul</li> </ul>
2.	Organizing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembagian job description tidak jelas sehingga karyawan tidak mengerjakan tugas secara spesifik</li> <li>• Tidak adanya anggaran khusus yang diberikan kepada TPI untuk dikelola guna keperluan pelelangan dari pemerintah setempat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan pekerja dilakukan sesuai kecakapan spesifikasi bidang</li> <li>• Pembagian job description jelas, karyawan bekerja sesuai tupoksi dan fokus pada tanggung jawab</li> <li>• Masih belum ada anggaran khusus yang diberikan kepada TPI untuk dikelola guna keperluan pelelangan dari pemerintah setempat.</li> </ul>

3. Actuating	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pembekalan atau kegiatan monitoring untuk membekali keahlian karyawan terkait tugasnya, dan pembagian tugas kurang terstruktur.</li> <li>• Kurangnya motivasi dan pengarahan, membuat karyawan mengalami penurunan kinerja</li> <li>• Tidak ada peraturan tegas dari TPI untuk penunggakan pembayaran borongan yang dilakukan bakul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan pembekalan dan diskusi grub sebelum karyawan ditempatkan pada pekerjaannya agar karyawan mengerti tugas yang akan dijalankan.</li> <li>• Tupoksi setiap bidang lebih jelas dan terstruktur.</li> <li>• Kepala UPTD dan administratur memberikan pengarahan serta <i>reword</i> pada karyawan di waktu tertentu agar karyawan lebih giat bekerja</li> <li>• Peraturan penunggakan dipertegas oleh TPI. Pencatatan hutang tertata dan penunggakan diberi tenggang waktu pelunasan maksimal 3 hari, dan diberlakukan skorsing jika tidak dilunasi.</li> </ul>
4. Controlling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dilakukan insidental jika ada pelelangan.</li> <li>• Diadakan rapat evaluasi 1 bulan sekali tapi tidak membuahkan hasil pada perubahan perbaikan kinerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dilakukan setiap hari oleh kepala UPTD dan administratur</li> <li>• Evaluasi kinerja dilakukan secara insidental, dengan melakukan evaluasi dan koreksi</li> <li>• Selalu dilakukan diskusi bersama untuk pengambilan keputusan dalam menentukan solusi dari permasalahan yang muncul sehingga tidak terulang.</li> <li>• Kepala UPTD rutin melaporkan perkembangan TPI pada Dinas pada rapat rutin 1 bulan sekali.</li> </ul>

Sumber: Data Diolah (2019)

### 5.7 Peran Manajemen TPI Terhadap Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan

Manajemen Tempat Pelelangan Ikan memiliki peran yang penting terhadap pemasaran hasil tangkapan nelayan. Manajemen yang diatur dengan baik akan menumbuhkan kepercayaan pada nelayan sehingga mengikuti pelelangan. Sebelum ada perbaikan manajemen TPI sempat berhenti beroperasi karena adanya konflik yang diakibatkan manajemen yang kurang terorganisir sehingga administrasi tidak berjalan dengan teratur dan transparan, bakul melakukan penunggakan pembayaran dan pencatatan tidak tersusun dengan baik sehingga pembayaran hasil pelelangan nelayan tidak terbayar tepat

waktu. Hal ini menimbulkan konflik diantara pihak TPI, nelayan, dan bakul. nelayan tidak mau mengikuti pelelangan kembali karen hasil pelelangan tidak dibayar tepat waktu sehingga TPI tidak dapat beroperasi. Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan perbaikan pada manajemen TPI sehingga TPI dapat beroperasi kembali secara bertahap. Pendekatan pada nelayan dan bakul juga dilakukan untuk menumbuhkan kpercayaan kembali, musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama hingga kebijakan penurunan retribusi.

Langkah yang dilakukan dinas memberikan hasil baik pada TPI, manajemen TPI mulai terorganisir dengan dilandaskan Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2014 semua mekanisme pelelangan berusaha dijalankan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan, kemudian diterapkan sistem pelelangan yang baru disertai *Standart Operasional Prosedur* (SOP) yaitu pelelangan murni. TPI dapat berjalan kembali meskipun belum sepenuhnya maksimal akan tetapi menunjukan peningkatan. Hal ini dibuktikan dari hasil produksi perikanan tangkap selama tiga tahun terakhir yang disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Tuban

Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Juta Rp)
2015	12.012,70	67.644,45
2016	13.709,30	77.356,86
2017	12.012,50	84.417,64

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, 2018.

Pada Tabel 10 menunjukan bahwa hasil produksi perikanan pada tahun 2017 mengalami peningkatan nilai produksi yaitu sebanyak Rp. 84.417,64,- dibanding tahu 2015 dan tahun 2016. Hal ini disebabkan karena Uji coba pelelangan yang dilakukan pada akhir tahun 2014 sempat terhenti pada pertengahan tahun 2015 yang disebabkan karena adanya kemacetan pembayaran dari bakul dan hilangnya kepercayaan nelayan pada TPI akibat manajemen yang kurang terorganisir. Sehingga hasil produksi perikanan Tuban

tidak terdata secara jelas. Pada akhir tahun 2017 baru dilakukan kegiatan pelelangan kembali. Pendataan produksi khususnya perikanan tangkap mulai dapat dilakukan dengan baik karena TPI telah beroperasi kembali.

Secara umum sebuah sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sistem pelelangan ikan di TPI Bulu Meduro merupakan salah satu sarana pemasaran hasil tangkapan nelayan yang dikelola langsung oleh pemerintah Kabupaten. Kelebihan dari sistem pelelangan ikan di TPI Bulu Meduro sebagai berikut :

1. Harga ikan hasil tangkapan nelayan lebih terkendali dan terpantau.
2. Penentuan harga disesuaikan harga pasaran dan dilakukan secara transparan sehingga nelayan dan bakul dapat menyaksikan proses jual beli secara langsung.
3. Menguntungkan nelayan karena harga ikan dapat lebih tinggi, tapi tidak merugikan bakul.
4. Mengangkat daya tawar nelayan dihadapan pedagang/ bakul

Sedangkan kekurangan dalam mengikuti lelang di TPI Bulu Meduro sebagai berikut :

1. Nyaur-Ngamek adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem pembayaran dengan cara mencicil yang dilakukan oleh pembeli, sehingga nelayan tidak bisa mendapatkan uang hasil penjualan ikan secara langsung.
2. Proses pelelangan membutuhkan waktu, karena lelang dilakukan sesuai nomor antrean kedatangan dan ini menyebabkan nelayan payang merugi.
3. Pihak TPI tidak bisa menyediakan peminjaman modal untuk nelayan malaut, hal ini menyebabkan nelayan meminjam modal pada tengkulak untuk melaut.

4. TPI mulai beroperasi pukul 06.00 – 10.00 WIB sehingga nelayan yang datang dari melaut sebelum dan sesudah jam tersebut tidak masuk pelelangan.



## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa :

1. Manajemen Tempat Pelelangan Ikan Bulu meduro Tuban sudah berjalan cukup baik, TPI dan Pelabuhan berada dibawah naungan yang berbeda TPI bertanggung jawab lagsung pada Dinas Perikanan dan Peternakan sedangkan Pelabuhan bertanggung jawab pada Propinsi. *Pertama* dari segi perencanaan dibuat oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban yang kemudian diimplementasikan oleh TPI, TPI telah memiliki *Standart Operasional Prosedur* (SOP) yang jelas dan memiliki peraturan yang mengacu pada Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2014. Akan tetapi masih terdapat prosedur yang belum sesuai peraturan yang berlaku, seperti bakul yang seharusnya menaruh uang di TPI sebelum mengikuti pelelangan akan tetapi belum dapat dilakukan. *Kedua* dari segi pengorganisasian struktur organisasi berbentuk lini, dimana hubungan pemimpin bersifat langsung, dan pengarahan dilakukan dari Kepala Dinas pada Kepala UPTD kemudian ke Administratur dan karyawan. *Ketiga* penggerakan telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok yang ditetapkan Peraturan Bupati, dan pelaksanaan teknis pelelangan dijalankan sesuai dengan SOP yang ada tetapi masih ada persoalan ketertiban peserta yang masih belum dapat diselesaikan hingga sekarang. *Keempat* adalah segi pengawasan dilakukan dengan baik, pengawasan dilakukan secara langsung setiap harinya oleh administratur dan Kepala UPTD.

2. TPI Bulu memiliki dua jenis sistem pelelangan yaitu pelelangan tertutup dan terbuka. Perbedaan antara sistem pelelangan tertutup (tradisional) dengan sistem pelelangan terbuka (murni) adalah sebagai berikut :
  - a. Sistem pelelangan tradisional dilakukan di dermaga bongkar muat secara langsung setelah ikan trun kapal, sedangkan pelelangan murni dilakukan setelah ikan dibongkar di dermaga dan dipindahkan di di Hall TPI dn mendapat karcis antrian peserta lelang.
  - b. Transaksi jual beli pelelangan tradisional dilakukan secara langsung dan harga ditentukan melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak saja dengan didampingi petugas TPI pembayaran juga dilakukan secara langsung baru kemudian kedua beah pihak akan membayar retribusi ke TPI, sedangkan pelalangan murni dilakukan didepan semua bakul dan nelayan peserta lelang dengan memulai penawaran dari harga terendah pasar kemudian terus dinaikan sampai mendapat satu bakul pemenang lelang kemudian nelayan dan bakul akan melakukan pembayaran maupun pengambilan uang di kasir TPI sesuai karcis dan membayar retribusi sesuai dengan peraturan.
  - c. Pelelangan murni lebih aman karena dilakukan dengan transparan dan pengawasan pihak TPI secara langsung dan rinci, sedangkan pelelangan tradisional masih memiliki resiko terjadinya permainan harga meskipun masih masih melalui perantara TPI.
3. Manajemen TPI memiliki peran yang angat penting terhadap pemasaran hasil tangkapan nelayan. Nelayan lebih memiliki kepercayaan mengikuti pelelangan apabila manajemen dijalankan dengan baik dan transparan. Sejak dioperasikan kembali TPI menunjukkan peningkatan kinerja tetapi masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, nelayan payang masih belum dapat ditertibkan untuk mengikuti pelelangan murni, masi ada

penunggakan pembayaran hasil borongan yang dilakukan bakul, dan penjualan tanpa melalui pelelangan karena adanya jerat sosial patron client.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pihak TPI harus lebih tegas dalam menerapkan peraturan yang telah ada dan menindak lanjuti pelanggaran dan ketidak tertiban utamanya yang dilakukan bakul dalam pembayaran hasil lelang agar nelayan tidak enggan mengikuti pelelangan. Selain itu, TPI dapat membuat SOP yang lebih efisien agar ikan hasil tangkapan payangan yang butuh penanganan cepat dapat ikutserta dalam pelelangan terbuka mengingat salah satu persoalan yang dikeluhkan nelayan payang adalah waktu yang digunakan untuk melelang ikan terlalu lama bagi ikan-ikan hasil kapal payang yang lebih mudah rusak sehingga mereka memilih melakukan pelelangan tertutup.
- 2) TPI harus hadir secara lengkap, bukan hanya sebagai fasilitas pemasaran tapi juga penyedia modal, sehingga nelayan tidak meminjam modal pada tengkulak dan terlibat jerat sosial. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan koperasi. Maka pemerintah daerah harus hadir untuk memberikan permodalan kepada TPI.
- 3) Diharapkan pada bakul dan nelayan untuk dapat lebih bekerjasama dengan TPI sehingga dapat bersinergi guna kemajuan TPI dan peningkatan kesejahteraan bagi bakul dan nelayan. Nelayan dan bakul bisa lebih terbuka menyampaikan keluhan sehingga TPI dapat melakukan perbaikan secara tepat guna.
- 4) Disarankan untuk akademisi, perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengurai permasalahan yang terjadi, sebagai mana tri darma perguruan tinggi bahwa peran dan fungsi untuk melakukan penelitian, pendidikan dan

pengabdian masyarakat. Maka penelitian lanjutan sangat diperlukan guna mengetahui sistem permodalan dan administrasi yang tepat digunakan di TPI Bulu Meduro.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dianto, M. W.; Harahab N.; Ismadi. 2015. Evaluasi Kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Menunjang Kesejahteraan Nelayan di Popoh, Desa Bosole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. *Jurnal ECSoFiM*. 3 (1).
- Dwiyantia, H. 2010. Kajian Pengelolaan Aktivitas Pelelangan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu Sukabumi Jawa Barat. Skripsi. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hasibuan, H. Malayu S.P. 2001. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hendrik, 2013. Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Berkala Perikanan Terubuk*. 41 (1).
- Hidayatullah, Syarif. 2013. Analisis Pengaruh Program Pelatihan karyawan dan Kepuasan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hermawan, D. 2009. Peningkatan Pengelolaan Pengkalan Pendaratan Ikan Pangandaran dan Wisata Pantai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Petanian Bogor. Bogor.
- Ismail S. 2009. Pengantar Manajemen. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kusnadi. 2004. Polemik Kemiskinan Nelayan. Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan, Bantul.
- Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Yogyakarta [ID]: Ar-ruzz Media. 161 hal.
- Lubis E, Bey P. A, Muningsar R, dan Hamzah S. 2012. Besaran Kerugian Nelayan dalam Pemasaran Hasil Tangkapan : Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. *Maspari Journal*, 2012, 4 (2), 159-167.
- Lubis, E. W.; Oktariza.; Dwiyanti, H. 2010. Pengelolaan Aktivitas Pelelangan Ikan : Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Munir, M. 1993. Manajemen Pelelangan Ikan Dan Peranannya Dalam Pemasaran Hasil Perikanan Di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Propinsi Jawa Tengah. Skripsi. Progra Studi Sosial Ekonomi Perikanan. Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

- Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rodakarya. Bandung.
- Peraturan Bupati Kabupaten Tuban nomor 52 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 12 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa timur nomor 14 tahun 1998 Tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Jawa Timur.
- Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rncangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup.
- Purwanti, P.; Fattah, M. 2012. Manajemen Dan Pengelolaan. *Self propagating entrepreneurial education development*. UB Distace Learning. Brawijaya University.
- Relawati R. 2012. Dasar manajemen Pendekatan aplikasi Bidang Pertanian. Penerbit UMM Press. Malang.
- Sarwanto, C.; Wiyono, E. S.; Nurani, T. W.; Haluna, J. 2014. Kajian Sistem Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY. *Jurnal Sosek KP*. 9 (2).
- Satiarso, O.; Widyaningsih N.; Suharno. 2010. Analisis Efisiensi Teknis Pelelangan Ikan dan Strategi Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Cilacap. *Jurnal EKO-REGIONAL*. 5 (1).
- Satria A. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. PT Pustaka. Cidesindo. Jakarta.
- Satrio, I. N.; Christanto, J. 2016. Peran Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan Terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas gajah Mada. Yogyakarta.
- Solihin, I. 2009. Pengantar manajemen. Erlangga: Jakarta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta: Bandung.
- Sule, E. T. dan Kurniawan S. 2005. Pengantar Manajemen. Prenada Media: Jakarta.
- Sutami, Wahyu. 2012. Analisis Manajemen Laba (Earning Management) Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Publik (Study Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2007-2009). Universitas Islam 45 Bekasi: Disertasi yang tidak dipublikasikan.
- Terry, Goerge. R. 2008. Prinsip-prinsip Manajemen. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

Undang - Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Jakarta. Diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal.

Winarno, D. 2015. Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Panimbang di Kabupaten Pandeglang. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.

Yin, Robert K (2003). *Studi Kasus Desain dan metode*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yustiarani, Anissa. 2008. Kajian Pendapatan Nelayan dari Usaha Penangkapan Ikan dan Bagian Retribusi Pelelangan Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Bogor.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian

#### 1. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban

##### A. Identitas Informan

Nama : Ir. M. Amenan, MT

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban

##### B. Waktu Wawancara

Hari, tanggal : Senin, 19 November 2018

Pukul : 15.00 WIB

##### C. Pertanyaan Wawancara

Program apa yang dibuat dinas untuk menjalankan TPI pak?

Siapa yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan program?

Berapa lama waktu/ target untuk pelaksanaan program?

Kendala apa yang dihadapi?

Bagaimana dengan persoalan bakul yang sulit ditertibkan pak?

Bagaimana dengan persoalan pembayaran bakul yang nunggak?

Adakah peraturan untuk mengatur pelelangan pak?

Bagaimana untuk penertiban peserta lelang khususnya nelayan melihat di lapang masih ada yang tidak masuk ke pelelangan seperti payang?

Bagaimana dengan pure seine yang ternyata juga masih ada yang tidak ikut lelang pak?

Ada sanksi atau tidak untuk ketidak ikutsertaan seperti itu?

Mungkin ada peraturan untuk penertiban peserta lelag begitu?

Kemudian terkait kepegawaian, perekrutan karyawan TPI itu seperti apa pak?

Bagaimana untuk pengaturan atau penempatan posisi karyawan pak?

Adakah pengarahan atau pembinaan untuk pegawai TPI dari Dinas pak?

Siapa yang melakukan pembinaan pak?

Kemudian soal fasilitas pak, komponen apa saja yang diberikan untuk TPI?

Siapa yang menyediakannya pak?

Adakah anggaran khusus untuk TPI pak?

Kalau untuk pengawasannya dinas ke TPI seperti apa?

Untuk pelaporan administrasi seperti apa?

TPI yang dulu fakum kenapa?

Soal retribusi itu kenapa diturunkan pak?

Tapi kalau diturunkan apa tidak berdampak pada menurunnya APBD?

## 2. Kepala UPTD Bulu

### A. Identitas Informan

Nama : Siswo Tri Arjunanto

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Sumurgung, Kabupaten Tuban

### B. Waktu Wawancara

Hari, tanggal : Selasa, 06 November 2018

Pukul : 13.00 WIB

### C. Pertanyaan Wawancara

Sudah berapa lama menjabat pak?

Pak sis : Mulai di tpi 1 januari 2017, membawahi 4 TPI diantaranya 2 TPI di Palang, 1 di Karangagung, 1 lagi ya Bancar ini.

Peneliti : Tugas di TPI apa saja pak? Dan apa program dari Dinas untuk TPI pak?

Yang bertanggung jawab siapa pak?

Berapa lama waktu/ target untuk pelaksanaan program?

Bagaimana jalannya program sejauh ini? Adakah kendala yang dihadapi?

Solusi yang dilakukan untuk menangani masalah tersebut?

Peraturan penertiban?

Apa bapak tau kenapa dulu TPI sempat tidak berjalan?

Bagaimana dengan teknis perekrutan karyawan dan penempatannya pak?

Adakah pengarahan atau pembinaan yang dilakukan dinas untuk karyawan TPI pak?

Pembinaan dilakukan dalam jangka berapa bulan sekali?

Kalau untuk fasilitas di TPI komponen apa saja yang dibutuhkan di TPI?

Lalu yang menyediakan siapa?

Bagaimana pengawasan yang dilakukan selama ini ?

Untuk pelaporan administrasi seperti apa pak?

### 3. Administratur TPI

#### A. Identitas Informan

Nama : Sudarwito

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Bulu Meduro, Kabupaten Bancar

B. Waktu Wawancara

Hari, tanggal : Senin, 05 November 2018

Pukul : 09.00 WIB

C. Pertanyaan Wawancara

Sudah berapa lama kerja disini pak?

Program dari Dinas untuk TPI sekarang apa?

Yang bertanggung jawab siapa pak?

Berapa lama target yang diberikan untuk penyelesaian program?

Bagaimana jalannya pelelangan sejauh ini pak? Kendalanya apa saja?

Apa solusi yang diberikan? Seperti payang yang tidak ikut lelang begitu gimana pak?

Peraturan penertiban?

Apa bapak tau kenapa dulu TPI sempat tidak berjalan?

Bagaimana dengan teknis perekrutan karyawan dan penempatannya pak?

Adakah pengarahan atau pembinaan yang dilakukan dinas untuk karyawan TPI pak?

Siapa yang melakukan pembinaan pak?

Kemudian soal fasilitas, apa saja komponen yang dibutuhkan?

Lalu yang menyediakan siapa?

Bagaimana pengawasan yang dilakukan selama ini ?

Untuk pelaporan administrasi seperti apa pak?

#### 4. Juragan 1

##### A. Identitas Informan

Nama : Darmaji

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Bulu Meduro

##### B. Waktu Wawancara

Hari, tanggal : Kamis, 8 November 2018

Pukul : 08.00 WIB

##### C. Pertanyaan Wawancara

Sudah berapa lama melaut?

Punya berapa kapal dan berapa ABK nya?

Sekali beangkat melaut brapa lama?

Siapa yang menyiapkan perbekalan untuk melaut?

Apa saja perbekalannya?

Bagaimana pendapat bapak dengan adanya pelelangan? Setuju atau tidak?

Tabungan dari mana pak?

Biasanya dapat berapa banyak sekali melaut?

Pembagian hasil seperti apa?

Bapak punya pekerjaan sampingan selain melaut?

Apa harapan bapak untuk TPI?

#### 5. Juragan 2

##### A. Identitas Informan

Nama : Nandar

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jenu

B. Waktu Wawancara

Hari, tanggal : Kamis, 8 November 2018

Pukul : 13.00

C. Pertanyaan Wawancara

Sudah berapa lama melaut?

Punya berapa kapal dan berapa ABK nya?

Sekali berangkat melaut berapa lama?

Siapa yang menyiapkan perbekalan untuk melaut?

Apa saja perbekalannya?

Biasanya dapat berapa banyak sekali melaut?

Ikan dijual kemana pak?

Bagaimana pendapat bapak dengan adanya pelelangan? Setuju atau tidak?

Pembagian hasil seperti apa?

Bapak punya pekerjaan sampingan selain melaut?

Apa harapan bapak untuk TPI?

6. Nelayan 1

A. Identitas Informan

Nama : Marto kusumo

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Bulu Meduro

B. Pertanyaan Wawancara

Hari, tanggal : Selasa, 13 November 2018

Pukul : 10.00 WIB

### C. Hasil Wawancara

Aslinya dari mana?

Sudah berapa lama jadi nelayan/ ABK?

Punya pekerjaan lain selain melaut?

Kalau lagi paceklik gimana pak? Dapat uang dari mana?

Juragan tidak membagikan uang hasil tabungan kalau paceklik pak?

Kapan biasanya melaut pak?

Kapalnya menggunakan alat tangkap apa pak?

Berapa jumlah ABK dalam 1 kapal?

Siapa yang menyiapkan perbekalan melaut? Disiapkan sendiri atau TPI?

Satu kali melaut bisa dapat berapa banyak pak?

Bagaimana sistem pembagian hasilnya?

Ikan dijual ke pelelangan atau tidak?

Bagaimana pendapat bapak tentang adanya pelelangan murni seperti sekarang?

Lebih menguntungkan dijual lewat pelelangan atau tidak?

Bagaimana hubungan nelayan disini dengan TPI, Bakul, atau Juragan?

Sebelumnya pernah dapat penyuluhan pelelangan?

Apa harapan bapak untuk TPI?

### 7. Nelayan 2

#### A. Identitas Informan

Nama : Kosim Maslan

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Ambulu

B. Waktu Wawancara

Hari, tanggal : Selasa, 13 November 2018

Pukul : 14.30 WIB

C. Pertanyaan Wawancara

Aslinya dari mana?

Sudah berapa lama jadi nelayan/ ABK?

Punya pekerjaan lain selain melaut?

Kalau lagi paceklik gimana pak? Dapat uang dari mana?

Juragan tidak membagikan uang hasil tabungan kalau paceklik pak?

Kapan biasanya melaut pak?

Kapalnya menggunakan alat taangkap apa pak?

Berapa jumlah ABK dalam 1 kapal?

Siapa yang menyiapkan perbekalan melaut? Disiapkan sendiri atau TPI?

Satu kali melaut bisa dapat berapa banyak pak?

Bagaimana sistem pembagian hasilnya?

Ikan dijual ke pelelangan atau tidak?

Bagaimana pendapat bapak tentang adanya pelelangan murni seperti sekarang?

Lebih menguntungkan dijual lewat pelelangan atau tidak?

Bagaimana hubungan nelayan disini dengan TPI, Bakul, atau Juragan?

Sebelumnya pernah dapat penyuluhan pelelangan?

Apa harapan bapak untuk TPI?

8. Bakul 1

A. Identitas Informan

Nama : Maslikati

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Ambulu

B. Waktu Wawancara

Hari, tanggal : Senin, 3 Desember 2018

Pukul : 14.00 WIB

C. Pertanyaan Wawancara

Asalnya dari mana?

Sudah berapa lama jadi bakul?

Punya pekerjaan sampingan?

Satu hari bisa beli berapa banyak?

Biasanya beli ikan dimana? Pelelangan atau diluar?

Bagaimana hubungan bakul dengan nelayan/ juragan dan dengan TPI disini?

Ikannya dijual kemana? Dalam bentuk apa?

Bagaimana pendapatnya tentang adanya lelang di TPI?

Fasilitas apa yang didapat dari TPI?

Pernah dapat penyuluhan tentang pelelangan sebelumnya?

Pernah bayar menghutang ke TPI?

Apa harapannya untuk TPI?

9. Bakul 2

A. Identitas Informan

Nama : Siti Munia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Bulu Meduro

B. Waktu Wawancara

Hari, tanggal : Selasa, 4 Desember 2018  
Pukul : 12.00 WIB

C. Pertanyaan Wawancara

Asalnya dari mana?

Sudah berapa lama jadi bakul?

Punya pekerjaan sampingan?

Satu hari bisa beli berapa banyak?

Biasanya beli ikan dimana? Pelelangan atau diluar?

Bagaimana hubungan bakul dengan nelayan/ juragan dan dengan TPI disini?

Ikannya dijual kemana? Dalam bentuk apa?

Bagaimana pendapatnya tentang adanya lelang di TPI?

Fasilitas apa yang didapat dari TPI?

Pernah dapat penyuluhan tentang pelelangan sebelumnya?

Pernah bayar menghutang ke TPI?

Apa harapannya untuk TPI?

Banyak yang menjual ikan tanpa lelang buk?

Apa tindakan dari TPI soal hal itu?

## Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



**Wawancara Kepala Dinas Perikanan dan  
Pernakan Kabupaten Tuban**



**Wawancara Administratur TPI bulu Meduro**



**Wawancara Nelayan Bulu Meduro**



**Wawancara Kepala UPTD**



**Wawancara Bakul TPI Bulu Meduro**



**Penertiban Bakul yang tidak mengikuti pelepasan oleh Satpol PP.**



**Pelaksanaan Pelelangan Murni di Hall TPI**



**Dermaga Bongkar Muat**